

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Bone Bolango)

Oleh

SARTINA ABD R. ONGKU

E.11.21.001

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Bone Bolango)

Oleh

Sartina Abd R. Ongku

E1121001

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar sarjana

Dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal

Gorontalo.....Mei 2025

Pembimbing I



Reyther Biki, SE., M.Si
NIDN. 0927077001

Pembimbing II


Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN. 0914027902

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi


Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN. 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Bone Bolango)**

Oleh
SARTINA ABD R. ONGKU
E.11.21.001


Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo.....2025

1. **Dr. Arifin, SE, M.Si**
(Ketua Penguji)
2. **Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
3. **Sulfianty, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
4. **Reyther Biki, SE., M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si**
(Pembimbing Pendamping)

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN./0928116901

Ketua Program Studi

Shella Budawan, SE., M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyetakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, April 2025

Yang membuat pernyataan



SARTINA ABD R. ONGKU
E11.21.001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Winston Churchill)

Persembahan

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk Ayah saya tercinta, kakak dan adik saya, sahabat, teman dan semua pihak yang telah bertanya “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?” , Kapan Nyusul?” dan lain sebagainya. Karena dorongan semua pihak khususnya ayah saya yang dengan doa nya dan selalu sabar menunggu saya selesai dalam perkuliahan, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

ABSTRACT

SARTINA ABD R. ONGKU. E1121001. THE EFFECT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD COMPREHENSION AND INFORMATION TECHNOLOGY USE ON FINANCIAL REPORTS QUALITY (A STUDY AT THE FINANCE AND REVENUE AGENCY OF BONE BOLANGO)

This study aims to find the effect of Government Accounting Standard Comprehension (X1) and information technology use (X2) on regional financial report quality (Y) at the Finance and Revenue Agency of Bone Bolango Regency. The methodology employed is a survey complemented by multiple linear regression analysis. The findings indicate that both Government Accounting Standard Comprehension (X1) and information technology use (X2) significantly affect regional financial report quality (Y) at the Finance and Revenue Agency of Bone Bolango Regency, with a p-value of 0.001. However, Government Accounting Standard Comprehension (X1) does not have a significant partial effect on financial report quality (Y), as indicated by a p-value of 0.195. In contrast, the sub-variable of information technology use (X2) shows a significant partial effect on financial report quality (Y), with a p-value of 0.001.

Keywords: government accounting standards, information technology, financial report quality

ABSTRAK

SARTINA ABD R. ONGKU. E1121001. PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN BONE BOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan adalah survei dengan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2), secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebesar 0,001. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,195. Sub variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,001.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintah, teknologi informasi, kualitas laporan keuangan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan" dapat tersusun dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada ayah tercinta, Abdul Rahman Ongku, yang telah memberikan dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah peneliti, kakak Ronal Abd. R. Ongku, serta almarhum dan almarhumah kakak dan adik, Moh. Ramdan Abd. R. Ongku dan Laila Sari Abd. R. Ongku, yang walaupun tidak hadir secara langsung, tetap menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam proses ini.

Dalam kesempatan yang baik ini ucapan terima kasih yang tulus juga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, yang telah memberikan dukungan bagi pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo. Terima kasih sebesar-besarnya peneliti tujukan kepada Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. H. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi; Ibu Shella Budiawan, SE, M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi; Bapak Reyther Biki, SE, M.Si selaku Pembimbing I; serta Ibu Rahma Rizal, SE, Ak, M.Si selaku Pembimbing II, atas bimbingan, nasihat, dan perhatian yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi 2021, khususnya sahabat-sahabat terdekat, Natasya Yuliana Panto, Nur Diyanti Tahaku, Septianti D. Sinta Hasan, dan Anggi Mustapa, atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan di masa mendatang.

Gorontalo, April 2025

SARTINA ABD R. ONGKU
E11.21.001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah	10
2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi	23
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan	29
2.2 Hubungan Antar Variabel	35

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	35
2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	37
2.3 Penelitian Terdahulu	39
2.4 Kerangka Pemikiran	45
2.5 Hipotesis	45
BAB III.....	47
OBJEYK DAN METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Objek Penelitian.....	47
3.2 Metode Penelitian	48
3.2.1 Desain Penelitian.....	48
3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	49
3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian	52
3.2.4 Jenis dan Sumber Data	54
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.3 Uji Kualitas Data	56
3.3.1 Uji Validitas	56
3.3.2 Uji Reliabilitas	57
3.4 Metode Analisis Data	57
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	57
3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda	58
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	59
3.4.5 Uji Hipotesis	61
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	64
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	64
4.1.2 Visi dan Misi.....	65
4.1.3 Struktur Organisasi	66
4.2 Hasil Penelitian	67

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	68
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	75
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	79
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis	85
4.2.5 Persamaan Linier Berganda	89
4.3 Pembahasan	91
4.3.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .	91
4.3.2 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	93
4.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	96
BAB V.....	99
KESIMPULAN DAN SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Opini LKPD Kabupaten Bone Bolango	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	52
Tabel 3. 2 Populasi BKPD	53
Tabel 3. 3 Sampel.....	54
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	67
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	68
Tabel 4. 3 Skala Penilaian	69
Tabel 4. 4 Distribusi Jawaban Responden Variabel X1	70
Tabel 4. 5 Distribusi Jawaban Responden Variabel X2.....	72
Tabel 4. 6 Distribusi Jawaban Responden Variabel Y	74
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel PSAP.....	76
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel PTI	77
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel KLK.....	78
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas	79
Tabel 4. 11 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	81
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas	83
Tabel 4. 13 Hasil Uji Glejser.....	84
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi variabel Y, X1 dan X2.....	86
Tabel 4. 15 Hasil Uji F Simultan.....	87
Tabel 4. 16 Hasil Uji T Parsial	88

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKPD Bone Bolango	66
Gambar 4. 2 Hasil Uji Grafik Histogram dan P-Plot.....	80
Gambar 4. 3 Hasil Uji Grafik Scatterplot.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana publik diharuskan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Kualitas laporan keuangan ini menjadi sangat penting karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah di suatu instansi, perencanaan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal agar tercapai efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Laporan keuangan dikatakan baik dan berkualitas apabila menyajikan informasi yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, (Ramadhan & Nurabiah, 2024).

Untuk mencapai kualitas tersebut, pemerintah daerah perlu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut UU No 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, keuangan negara yaitu seluruh hak dan kewajiban suatu negara yang bisa diukur dengan uang, maupun segala sesuatu seperti alat yang bisa dijadikan milik negara yang berkaitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 6 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa, pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat

pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah. Suatu pelaporan keuangan berkualitas harus dibuat oleh prinsip dan aturan yang terdapat di dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga suatu laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam pengambilan keputusan (Ikyarti & Aprilia, 2019).

Selain standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi menjadi aspek dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peraturan pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan Keputusan (Ardianto & Eforis, 2019).

Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat dan juga optimal, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dalam rangka memastikan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, peran lembaga pengawas eksternal sangat diperlukan. Salah satu Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor

eksternal pemerintah bertugas melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan oleh pemeriksa yakni: (a) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (b) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (c) opini Tidak Wajar, dan (d) Pernyataan Menolak dalam memberi opini atau tidak memberi pendapat (Disclaimer).

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang secara konsisten berhasil memperoleh opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, berkat kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagai instansi yang bertanggung jawab utama dalam penyusunan pelaporan keuangan, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) memainkan peranan penting untuk mendukung kualitas pelaporan keuangan daerah yang menjadi dasar capaian opini WTP yang konsisten. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone Bolango telah memenuhi standar yang ditetapkan dan dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi. Berikut hasil opini LKPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2013-2023.

Tabel 1. 1 Opini LKPD Kabupaten Bone Bolango

Tahun	Opini BPK
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK-RI, 2013-2023.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, LKPD Kabupaten Bone Bolango secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 tahun berturut-turut. Opini WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan mencerminkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan daerah.

Meski demikian, walaupun telah memperoleh Opini WTP, hal ini tidak dapat menjamin proses penyusunan laporan keuangannya benar-benar bebas dari kendala teknis maupun administratif. Masalah yang ditemui misalnya, pada beberapa bidang di BKPD sebagian pegawai belum sepenuhnya memahami detail SAP, sehingga pada bidang akuntansi masih harus mengoreksi dan menyesuaikan kembali sebelum laporan keuangan disatukan dalam laporan final. Masalah lain yg ditemukan yaitu masih kurangnya pemahaman akuntansi pada bidang non

akuntansi dalam membedakan antara belanja modal dan belanja barang/jasa, sehingga terjadi kesalahan penggolongan transaksi ke dalam pos anggaran yang tidak tepat.

Pemanfaatan teknologi informasi yg menjadi salah satu unsur dalam penyusunan laporan keuangan juga mengalami kendala. Masalah yg ditemukan yaitu masih ada sejumlah pegawai yang memilih mencatat transaksi secara manual menggunakan Excel karena belum mahir menggunakan aplikasi SIMDA. Selain itu, kurangnya pelatihan tentang update sistem keuangan sehingga membuat beberapa pegawai tidak mengetahui fitur terbaru yang tersedia dalam sistem, yang dapat mempercepat pekerjaan mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Rosana & Bharata (2023) dan Ihvani *et al.* (2021) menemukan bahwa penerapan SAP meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta manajemen pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian oleh Ayem & Amahala (2023) serta Sari (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah proses pelaporan keuangan, karena semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin meningkat kualitasnya.

Meski demikian, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Ramadhan & Nurabiah (2024), dalam penelitiannya menemukan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya pemahaman para pegawai atau aparatur keuangan terkait standar

akuntansi pemerintahan masih kurang, sehingga tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian lain mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap laporan keuangan, namun berpengaruh secara signifikan ketika diuji secara simultan. (Shohabatussa'adah & Nasrullah, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
- 2) Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
- 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

- 4) Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan, terutama terkait pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta dapat menambah referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan berbagai pihak dapat memperoleh wawasan dan panduan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat serta berguna bagi :

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam memahami dan menganalisis pemahaman SAP dan pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga membantu peneliti menambah wawasan berpikir dan ketrampilan Menyusun laporan penelitian yang baik, yang akan berguna dalam menunjang karir dan kompetensi di bidang akuntansi pemerintah.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah, khususnya BKPD Kabupaten Bone Bolango dalam mengoptimalkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar kualitas laporan keuangan dapat terus meningkat dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Selain itu, penelitian ini dapat membantu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa dan peneliti lainnya yang tertarik untuk mengkaji dan mengembangkan penelitian lebih dalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah lahir dari kebutuhan akan sistem pencatatan akuntansi yang baik, yang tidak hanya membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi sektor lain seperti UKM dalam menata pembukuan bisnis. Standar ini dirumuskan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan terus berkembang. Sebelum tahun 2003, Standar akuntansi pemerintah menggunakan basis kas murni. Pada periode 2004 hingga 2014, Standar akuntansi pemerintah bertransformasi menggunakan basis kas menuju akrual, di mana pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berbasis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana diakui berbasis akrual. Sejak 2015, Indonesia telah menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh dalam pelaporan keuangannya.

Standar akuntansi pemerintah disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan terdiri atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), serta Buletin Teknis SAP yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk menjamin

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik serta menjadi pedoman yang menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Laoli & Mukti (2019) yang dimaksud dengan Standar akuntansi pemerintah dapat didefinisikan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini bertujuan meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah. Mardiasmo (2019) menambahkan bahwa SAP merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan yang tepat. Udiyanti *et al* dalam Rohmah *et al* (2020) yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai dimensi pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, meliputi pemahaman terhadap neraca, penyajian laporan realisasi anggaran, penyajian laporan arus kas, penyajian CALK, penilaian persediaan, pengakuan investasi, pengakuan aset tetap, perlakuan akuntansi konstruksi, perlakuan akuntansi kewajiban serta perlakuan akuntansi koreksi

kesalahan. Kurniawan dan Syafri (2018) menegaskan bahwa penguasaan SAP tidak hanya mencakup pemahaman normatif atas regulasi, tetapi juga kemampuan praktis dalam menerapkan metode pengukuran seperti penilaian aset tetap, persediaan, dan kewajiban serta menyajikan catatan atas laporan keuangan secara komprehensif. Oleh karena itu, SAP menjadi fondasi utama bagi setiap entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan yang andal dan berguna bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat luas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
- b) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016
- c) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019
- d) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2020
- e) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2021
- f) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2022
- g) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2025

- h) Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2019)
- i) Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2020)

Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan negara dan tuntutan transparansi. Pada tahun 2025, pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) resmi meluncurkan dua Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) baru, yaitu PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama. PSAP 18 Transaksi nonpertukaran seperti pajak, retribusi, atau hibah yg menjadi area abu-abu dalam pelaporan keuangan pemerintah. PSAP 18 hadir untuk menjawab tantangan ini dengan merinci kriteria pengakuan, pengukuran, dan pelaporan pendapatan jenis ini.

Sebagaimana diatur dalam draft PSAP 18, pendapatan dari transaksi nonpertukaran diakui ketika terjadi peningkatan aset bersih pemerintah, kecuali jika transaksi tersebut menimbulkan kewajiban yang harus diakui. Misalnya, penerimaan pajak penghasilan akan diakui sebagai pendapatan saat wajib pajak menyetorkan kewajibannya, bukan saat dana masuk ke kas negara. Sedangkan PSAP 19 mengatur dua bentuk pengaturan Bersama yaitu operasi bersama (*joint operation*) dan ventura bersama (*joint venture*). Pada *joint operation*, setiap instansi peserta memiliki hak dan kewajiban proporsional terhadap aset dan liabilitas proyek. Sementara itu, *joint venture* mewajibkan pencatatan ekuitas berdasarkan porsi kepemilikan. Standar ini mengharuskan pemerintah merevisi

sistem akuntansi daerah agar mampu membedakan kedua model tersebut secara teknis.

2. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah dirancang sebagai kerangka hukum dan teknis untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan utama memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas informasi keuangan. Penjelasan terkait tujuan standar akuntansi pemerintah, sebagai berikut:

- a) Memberi pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN/APBD
SAP menjadi acuan baku dalam merumuskan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang wajib disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan
Penerapan prinsip SAP mendorong entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara akurat dan dapat diuji, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.
- c) Menjamin kualitas dan reliabilitas laporan keuangan
Dengan persyaratan hukum dan teknis yang jelas, SAP memastikan informasi keuangan yang disajikan relevan, andal, dan dapat diverifikasi oleh auditor maupun pengguna eksternal.
- d) Memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dirancang untuk memberikan manfaat maksimal kepada pengguna—baik

internal maupun eksternal—dengan memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

e) Mewujudkan transparansi publik

SAP menuntut pengungkapan lengkap atas transaksi dan kebijakan akuntansi, sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran terbuka mengenai kondisi keuangan dan ketaatan pemerintah terhadap peraturan.

f) Memfasilitasi proses pengawasan dan audit

Penyajian data akuntansi yang sistematis dan konsisten memudahkan Badan Pemeriksa Keuangan maupun aparat pengawas lain untuk melakukan penilaian kepatuhan dan keandalan laporan keuangan.

g) Mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja

Informasi akuntansi yang dihasilkan sesuai SAP menjadi dasar bagi perencanaan anggaran, formulasi kebijakan publik, serta penilaian efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga pemerintah.

h) Menjamin konsistensi dan comparability antar entitas

Prinsip-prinsip SAP menciptakan kerangka kerja yang seragam, memudahkan perbandingan laporan keuangan antara instansi pusat dan daerah, serta antar periode pelaporan.

i) Mengoptimalkan penerapan akuntansi berbasis akrual

SAP mendorong transisi dari basis kas menuju akrual untuk memastikan seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas tercatat secara memadai, mencerminkan kondisi keuangan yang lebih menyeluruh.

j) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya publik

Dengan informasi keuangan yang handal dan transparan, SAP berkontribusi pada penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam rangka tujuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah

Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Mentu & Sondakh, 2016) mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a) Basis Akrua

SAP mengadopsi basis akrual dalam menyusun laporan operasional, di mana pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul, terlepas dari realisasi kas. Namun, untuk memenuhi ketentuan hukum, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap menggunakan basis kas. Pendapatan berbasis akrual, misalnya, diakui saat entitas memiliki hak hukum atas penerimaan tersebut, meskipun dana belum masuk ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hal ini memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, bukan hanya arus kas fisik.

b) Nilai Historis (Historical Kost)

Prinsip ini menekankan pencatatan aset berdasarkan biaya perolehan awal, yakni jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan saat aset tersebut diperoleh. Nilai historis dipilih karena sifatnya yang objektif dan mudah diverifikasi melalui dokumen pembelian. Misalnya, pembangunan gedung

pemerintah dicatat sesuai biaya konstruksi yang tercantum dalam kontrak, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Meskipun dinilai kurang fleksibel, prinsip ini mencegah manipulasi nilai aset dan menjamin konsistensi pelaporan.

c) Realisasi (Realization)

Pendapatan berbasis kas diakui setelah mendapat otorisasi anggaran dan memengaruhi posisi kas dalam periode pelaporan. Prinsip ini menjamin bahwa penggunaan dana untuk belanja atau pembayaran utang sesuai dengan alokasi yang telah disetujui. Contohnya, dana bantuan sosial yang tercantum dalam APBD diakui sebagai pendapatan saat dicairkan, meskipun hak penerimaan telah ada sejak anggaran disahkan.

d) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance over Form)

Transaksi harus dicatat sesuai dengan esensi ekonomi, bukan sekadar kepatuhan pada formalitas hukum. Misalnya, jika pemerintah menyewa gedung dengan opsi pembelian di akhir kontrak, transaksi ini mungkin substansinya merupakan pembelian secara berkala, sehingga harus dicatat sebagai aset dan kewajiban, bukan sekadar sewa. Setiap ketidaksesuaian antara substansi dan bentuk wajib dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk menghindari kesalahpahaman pengguna laporan.

e) Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi pemerintah dibagi ke dalam periode tertentu (tahunan, triwulan, atau semester) untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Periode tahunan menjadi acuan utama, tetapi

laporan interim seperti laporan triwulan membantu pemantauan realisasi anggaran secara berkala. Pembagian ini memungkinkan analisis tren keuangan dan perbandingan antarperiode.

f) Konsistensi (Consistency)

Penerapan metode akuntansi yang sama pada transaksi serupa di setiap periode menjadi kunci keandalan laporan keuangan. Perubahan metode hanya diperbolehkan jika menghasilkan informasi yang lebih relevan, dengan syarat dampak perubahan tersebut diungkapkan dalam CaLK. Contohnya, jika entitas beralih dari metode penyusutan garis lurus ke saldo menurun, alasan dan efek perubahan terhadap nilai aset harus dijelaskan secara transparan.

g) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Seluruh informasi material yang memengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan wajib disajikan, baik pada lembar utama laporan maupun dalam CaLK. Prinsip ini mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi, kontinjensi, dan risiko potensial. Misalnya, jika pemerintah terlibat dalam gugatan hukum yang berpotensi menimbulkan kewajiban, hal ini harus diungkapkan untuk memberi gambaran utuh kondisi keuangan.

h) Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan harus disusun secara objektif dengan menerapkan kehati-hatian. Aset tidak boleh dinilai berlebihan, dan kewajiban tidak boleh diremehkan. Pertimbangan profesional diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian, seperti estimasi masa manfaat aset atau potensi kerugian

akibat bencana alam. Prinsip ini menjamin laporan keuangan tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan realitas ekonomi secara proporsional.

4. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan karakteristik kualitatif laporan keuangan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat diukur dari beberapa indikator yaitu memahami penyajian neraca, memahami penyajian laporan realisasi anggaran, memahami penyajian laporan arus kas, memahami penyajian catatan atas laporan keuangan, memahami penilaian persediaan, memahami pengakuan investasi, memahami pengakuan aset tetap, memahami perlakuan akuntansi konstruksi, memahami perlakuan akuntansi kewajiban, memahami perlakuan akuntansi koreksi kesalahan (Sihasale, 2018).

a) Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pada akhir periode pelaporan, yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pemahaman terhadap neraca berarti aparaturnya mampu menyusun, membaca, dan menganalisis setiap komponen neraca dengan tepat sesuai dengan prinsip SAP. Hal ini mencakup pengetahuan tentang klasifikasi aset lancar dan tidak lancar, pengakuan kewajiban jangka pendek dan panjang, serta perhitungan ekuitas

dana yang akurat. Kemampuan ini sangat penting agar nilai-nilai yang tercantum dalam neraca benar-benar mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sebenarnya.

a) Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode anggaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pemahaman pada indikator ini mencakup kemampuan untuk menyusun LRA secara sistematis, mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan realisasi, serta menganalisis faktor-faktor penyebab selisih tersebut. Aparatur yang memahami SAP akan mampu memastikan bahwa setiap transaksi diakui dan dilaporkan pada periode yang benar, serta dapat menjelaskan implikasi realisasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah.

b) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas berfungsi untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Pemahaman laporan arus kas berarti pegawai mampu mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas, serta menyusun laporan yang menggambarkan likuiditas dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, pemahaman ini juga mencakup pengetahuan tentang metode penyusunan arus kas (langsung dan tidak langsung) serta interpretasi hasil laporan untuk pengambilan keputusan keuangan.

c) Penyajian CALK (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian penting yang memberikan penjelasan rinci, kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan terkait pos-pos yang tercantum pada laporan keuangan utama. Pemahaman pada aspek ini meliputi kemampuan menyusun CALK secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan standar, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan transparan kepada pengguna laporan. CALK juga berfungsi untuk mengungkapkan hal-hal penting yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka, seperti metode penilaian aset, kebijakan pengakuan pendapatan, dan penjelasan atas kejadian penting setelah tanggal pelaporan.

d) Penilaian Persediaan

Penilaian persediaan adalah proses menentukan nilai barang yang dimiliki pemerintah pada akhir periode pelaporan. Pemahaman pada indikator ini mencakup pengetahuan tentang metode penilaian persediaan (misalnya FIFO, rata-rata tertimbang), pencatatan mutasi persediaan, serta pengakuan kerugian akibat penyusutan atau kehilangan barang. Aparatur yang memahami SAP akan dapat memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi fisik dan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan distorsi pada laporan keuangan.

e) Pengakuan Investasi

Pengakuan investasi berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan dana yang ditempatkan pemerintah pada instrumen keuangan atau entitas lain, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman indikator ini mencakup

identifikasi jenis investasi, penentuan nilai investasi yang diakui, serta perlakuan akuntansi atas pendapatan atau kerugian investasi. Aparatur harus mampu membedakan antara investasi permanen dan non-permanen serta memahami perlakuan akuntansi atas perubahan nilai investasi.

f) Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap adalah sumber daya berwujud yang dimiliki pemerintah untuk digunakan dalam operasional lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Pemahaman pada indikator ini meliputi prosedur pengakuan, penilaian awal, perhitungan penyusutan, serta perlakuan atas revaluasi atau penghapusan aset tetap. Aparatur juga harus memahami pentingnya pencatatan aset tetap secara teratur agar nilai yang tercantum dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya.

g) Perlakuan Akuntansi Konstruksi

Perlakuan akuntansi konstruksi mengacu pada pencatatan dan pelaporan aset yang masih dalam proses pembangunan (konstruksi dalam pengerjaan). Pemahaman pada aspek ini mencakup pengetahuan tentang kapan suatu aset diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, bagaimana biaya pembangunan dicatat, serta kapan aset tersebut dipindahkan ke aset tetap setelah selesai. Aparatur yang memahami SAP akan mampu memastikan bahwa nilai konstruksi dalam pengerjaan dilaporkan secara akurat dan tidak menyesatkan.

h) Perlakuan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang pemerintah yang harus dibayar di masa mendatang akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Pemahaman pada indikator ini

meliputi identifikasi, pengakuan, dan pengukuran kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aparatur harus mampu membedakan antara kewajiban lancar dan tidak lancar, serta memahami perlakuan akuntansi atas pembayaran atau pelunasan kewajiban.

i) **Perlakuan Akuntansi Koreksi Kesalahan**

Koreksi kesalahan adalah proses memperbaiki pencatatan atau pelaporan yang tidak tepat pada periode sebelumnya. Pemahaman pada indikator ini mencakup pengetahuan tentang prosedur identifikasi, pengakuan, dan pelaporan koreksi kesalahan sesuai dengan SAP. Aparatur yang memahami aspek ini akan mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan tetap andal dan dapat dipercaya.

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengertian Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat dipahami sebagai upaya atau tindakan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara efektif dan efisien. Menurut Goodhue dan Thompson (1995) yang dikutip dalam Rachmadi (2020), pemanfaatan teknologi informasi adalah tindakan mengaplikasikan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan proses kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Menurut Sutabri (2014) dalam Zainuddin *et al.* (2023), Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Suryawan dan Ginting (2023) menjelaskan bahwa pemahaman dan kemampuan memprediksi manfaat dari sistem teknologi informasi sangat krusial bagi individu agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga berdampak positif pada kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya sebatas penggunaan alat, tetapi juga melibatkan pemahaman dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi tersebut. Taufik et al. (2022) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi saat ini tidak hanya terbatas pada pengolahan teks atau gambar, melainkan juga mencakup berbagai bentuk multimedia dan analisis data yang kompleks. Selain itu, Wibawa dan Pritandhari (2020) mengutip Kadir (2013) yang menyatakan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam menggantikan, memperkuat, dan merestrukturisasi peran manusia dalam berbagai proses kerja. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi juga berfungsi sebagai alat bantu yang dapat mengotomasi tugas, menyediakan informasi pendukung, dan menginisiasi perubahan dalam proses kerja. Berdasarkan PP NO. 71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk meningkatkan keandalan dan ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan.

Secara umum, berdasarkan berbagai pendapat tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dapat diartikan sebagai proses penggunaan teknologi yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi atau individu.

2. Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan berbagai aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun sektor bisnis. Di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan data dan sistem informasi secara digital sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data yang valid dan terkini (Amalia, 2020). Berikut adalah tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi/lembaga.

a) Meningkatkan Efisiensi Proses Kerja

Pemrosesan data dan dokumen yang dahulu memakan waktu berjam-jam kini dapat selesai dalam hitungan menit berkat sistem digital. Pegawai tidak lagi perlu melakukan entri manual berulang-ulang, sehingga waktu luang dapat dialihkan untuk tugas-tugas strategis yang memerlukan analisis dan kreativitas. Selain itu, otomatisasi alur kerja mengurangi antrean dan mempercepat layanan publik.

b) Meminimalkan Kesalahan Manusia

Dengan formulir elektronik dan validasi otomatis, kesalahan pengetikan atau perhitungan dapat ditekan secara signifikan. Sistem akan memberi peringatan jika ada data yang tidak sesuai format atau di luar batas wajar, sehingga data yang masuk lebih akurat. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Meningkatkan Aksesibilitas Data

Data tersimpan dalam basis data terpusat yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja (dengan izin sesuai). Staf di berbagai bidang mulai dari akuntansi hingga perencanaan bisa melihat informasi mutakhir tanpa harus meminta salinan fisik. Ini memungkinkan koordinasi lintas bidang berlangsung lebih lancar.

d) Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Dashboard interaktif dan laporan real-time membantu manajemen dalam memantau kinerja, tren pengeluaran, maupun potensi masalah sejak dini. Dengan visualisasi data, pola-pola penting lebih cepat terlihat, sehingga keputusan dapat diambil dengan landasan bukti kuat, bukan sekadar intuisi.

e) Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap transaksi atau perubahan data terekam jejaknya (audit trail). Bila ada pertanyaan atau sengketa, jejak digital ini memudahkan penelusuran siapa melakukan apa dan kapan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik karena semua proses dapat dipertanggungjawabkan.

f) Menghemat Biaya Operasional

Meskipun ada investasi awal untuk perangkat keras dan lisensi perangkat lunak, dalam jangka panjang biaya cetak, penyimpanan arsip fisik, dan perawatan dokumen manual akan menurun drastis. Energi dan ruang kantor pun bisa dialokasikan lebih efisien.

g) Meningkatkan Keamanan Data

Sistem TI modern dilengkapi enkripsi, kontrol akses berbasis peran, serta mekanisme backup otomatis. Jika terjadi bencana atau kegagalan hardware, data masih dapat dipulihkan dari cadangan, sehingga operasi organisasi tidak terganggu lama.

h) Mendorong Budaya Kerja Digital

Penerapan TI memacu pegawai untuk terus belajar alat dan metode baru, membangun budaya adaptif terhadap perubahan. Kompetensi digital menjadi bagian dari kinerja, sehingga organisasi lebih siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan.

3. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi secara umum terdiri dari empat indikator yaitu jumlah komputer yang memadai, pemanfaatan jaringan Internet, proses akuntansi yang terkomputerisasi, dan penggunaan software sesuai ketentuan hukum, Zubaidi *et al.* (2019). Keempat indikator ini saling berkaitan untuk mendukung efektivitas dan juga efisiensi tugas pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Penjelasan mengenai empat indikator tersebut, sebagai berikut:

a) Ketersediaan Jumlah Komputer yang memadai

Ketersediaan unit komputer yang memadai menjadi dasar dalam implementasi *e-Government*, karena komputer berperan sebagai akses bagi pegawai untuk menjalankan aplikasi keuangan dan pengolahan data. Sarana komputer yang cukup menjadi penunjang penting dalam suatu instansi karena keterbatasan perangkat dapat menghambat produktivitas, misalnya memaksa pegawai bergantian menggunakan satu komputer atau mengandalkan metode manual. Selain itu, spesifikasi perangkat yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi keuangan seperti kapasitas RAM atau sistem operasi terbaru juga menentukan kelancaran dalam proses pengimputan data.

b) Pemanfaatan Jaringan Internet

Akses internet yang memadai memungkinkan instansi pemerintah untuk menyediakan informasi public dengan cepat dan transparan kepada Masyarakat, misalnya melalui portal resmi atau sistem pengaduan online. Selain itu, koneksi internet yang stabil dapat mendukung pengoperasian sistem pemantauan dan pengawasan berbasis digital seperti CCTV terintegrasi, sehingga akan meningkatkan efisiensi pebgelolaan sarana dan prasarana public.

c) Proses Akuntansi yang Terkomputerisasi

Komputerisasi adalah penggunaan komputer dan perangkat lunak khusus untuk mencatat, menyimpan, dan menganalisis data transaksi keuangan secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan akurasi laporan. Proses akuntansi terkomputerisasi mengurangi risiko kesalahan hitung atau *human error* dan mempercepat rekonsiliasi data, sistem akuntansi

terkomputerisasi juga memanfaatkan basis data terpusat yang memungkinkan pembaruan informasi secara *real time* dan kemudahan penelusuran audit trail.

d) Penggunaan Software Sesuai Ketentuan Hukum

Penggunaan aplikasi dan perangkat lunak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya Perkominfo No. 4/2024 tentang SPBE) menjamin legalitas, keamanan data serta interoperabilitas sistem elektronik pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tata Kelola sistem elektronik, termasuk persyaratan keamanan, perlindungan data, dan larangan penyebaran konten ilegal, yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah dalam memilih dan menggunakan perangkat lunak.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Ratna *et al.* (2023) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi formal yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas pada periode tertentu, dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang berguna bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Munawir (2015:5) dalam Arza *et al.* (2021) mendefinisikan laporan keuangan adalah Laporan Keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengelola data keuangan. Laporan keuangan suatu laporan yang

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode berikutnya dan pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data yang dapat dikatakan sebagai informasi.

Menurut Assad *et al.* (2023), Kualitas laporan keuangan mengacu pada keandalan informasi yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat Keputusan ekonomi. Laporan keuangan berkualitas tinggi memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Menurut Dang *et al.* (2020) dalam Asyik *et al.* (2023), Kualitas laporan keuangan akan dikaji dari dua aspek yang berbeda. Pertama, kualitas laporan keuangan menunjukkan kinerja Perusahaan yang tercermin pada informasi laba. Informasi laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laba yang diperoleh pada tahun berjalan dapat dijadikan indikator untuk menghasilkan laba di masa mendatang.

Menurut Erlina (2015) dalam Suhayati & Herdiah 2021) menyatakan Kualitas laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi, ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan Keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya, Erlina (2015) dalam (Apriansyah *et al*, 2020).

3. Tujuan Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari proses pengelolaan keuangan yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi dalam entitas pemerintah daerah. Menurut Said dan Noch (2018), laporan keuangan yang berkualitas harus mampu memberikan informasi yang jujur, bebas dari kesalahan material dan tidak menyesatkan, serta dapat diverifikasi oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku agar dapat mencerminkan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan utama dari kualitas laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi tersebut harus relevan dan dapat dipercaya sehingga dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah serta

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah dapat menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik. kualitas laporan keuangan berperan penting dalam mendukung proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Laporan yang akurat dan tepat waktu menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien. Sebaliknya, laporan yang kurang berkualitas dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat dan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan public.

5. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan dijelaskan sebagai ukuran normatif yang harus terpenuhi dalam penyajian informasi akuntansi agar tujuan pelaporan dapat tercapai dengan baik. Keempat karakteristik ini yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas sesuai dengan yang diharapkan (Mardiasmo, 2019).

a) Relevan

Relevansi merupakan salah satu karakteristik paling penting dalam laporan keuangan. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu memengaruhi

keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan, baik untuk menilai kinerja masa lalu, kondisi saat ini, maupun memprediksi keadaan di masa depan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan hasil di masa depan serta mengevaluasi keputusan yang telah diambil sebelumnya. Selain itu, relevansi juga menuntut agar informasi disajikan secara tepat waktu. Jika informasi diberikan terlambat, maka nilai manfaatnya akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara periodik dan tepat waktu agar informasi yang dihasilkan tetap relevan bagi para pengguna.

b) Andal

Keandalan atau reliabilitas adalah karakteristik yang menekankan bahwa informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Informasi yang andal harus bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat diverifikasi oleh pihak lain. Artinya, jika laporan keuangan diperiksa oleh auditor atau pihak independen, maka hasilnya akan tetap sama dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Keandalan juga berarti bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur yang benar, sehingga pengguna dapat yakin terhadap keakuratan data yang disajikan. Dengan demikian, keandalan menjamin bahwa laporan keuangan tidak menyesatkan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang penting.

c) Dapat Dibandingkan

Keterbandingan adalah kemampuan laporan keuangan untuk dibandingkan baik antar periode dalam satu entitas maupun dengan entitas lain yang sejenis. Keterbandingan sangat penting agar pengguna laporan keuangan dapat menilai tren keuangan, menganalisis perkembangan kinerja, serta melakukan evaluasi atas pencapaian target organisasi. Untuk mencapai keterbandingan, organisasi harus konsisten dalam menerapkan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya. Jika terjadi perubahan kebijakan atau metode akuntansi, perubahan tersebut harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan agar pengguna dapat memahami dampaknya. Dengan demikian, keterbandingan memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang lebih bermakna dan objektif.

d) Dapat Dipahami

Kemudahan pemahaman merupakan karakteristik yang menekankan bahwa laporan keuangan harus disusun dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dimengerti oleh para pengguna. Informasi yang kompleks atau teknis harus dijelaskan dengan catatan tambahan agar tidak menimbulkan kebingungan. Laporan keuangan yang baik menggunakan istilah yang umum dan struktur yang logis, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi yang mendalam. Dengan penyajian yang sederhana dan transparan, laporan keuangan dapat digunakan secara optimal untuk berbagai tujuan, mulai dari evaluasi kinerja, pengawasan, hingga pengambilan keputusan strategis.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan beberapa pendapat, pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Darmawan (2019) menegaskan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang baik terhadap SAP merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, Andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Sementara itu, Apriansyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. SAP berfungsi semacam acuan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang termuat apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitasnya penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Pengaruh penerapannya dalam hal ini adalah apabila kegiatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam SAP secara benar dan lengkap maka otomatis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosana & Bharata (2023) dan Ihyani *et al.* (2021) menemukan bahwa penerapan SAP meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta manajemen pelaporan keuangan, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asdi & Munari (2023) dan Jauhari *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah (PSAP) memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan daerah dan SAP menjadi salah satu mekanisme pengendalian dalam pembuatan laporan keuangan agar dapat disajikan dan disajikan secara wajar dan berkualitas. Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Laoli & Mukti (2019) dan Lantu *et al.* (2023) juga menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dari beberapa pendapat dan penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi berperan sangat penting terhadap kualitas laporan keuangan untuk meningkatkan keandalan dan ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan, informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi dan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik. Berdasarkan beberapa pendapat, pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah menurut Rachmawati & Anik (2020) menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan transaksi keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Menurut Wiranti & Wahid (2021) menyatakan bahwa Penggunaan teknologi informasi di sektor keuangan memungkinkan adanya transparansi dan keterbandingan dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi berbasis komputerisasi membantu penyusunan laporan yang konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi, sehingga memudahkan evaluasi kinerja secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Ternalempa *et al.* (2021) menyatakan bahwa Integrasi teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, menurut Fauzi *et al.* (2020) menyatakan bahwa Teknologi

informasi yang diimplementasikan secara efektif dalam proses akuntansi membantu meningkatkan reliabilitas laporan keuangan. Dengan teknologi yang tepat, data dapat dikelola dan diolah dengan lebih akurat dan aman, sehingga pengguna laporan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kualitas informasi yang disajikan.

Peraturan pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan Keputusan (Ardianto dan Eforis, 2019).

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Amahala (2023) dan Sari (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah proses pelaporan keuangan, karena semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin meningkat kualitasnya. Selain itu, penelitian oleh Ridzal *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi di sektor publik dapat meningkatkan ketepatan waktu dan keandalan data dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Selanjutnya, penelitian oleh Rahmawati & Suwandi (2020) juga menemukan bahwa penerapan perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi manajemen secara signifikan meningkatkan akurasi dan keterbandingan laporan keuangan di Lembaga pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari & Fauzi (2023) di sektor swasta juga mendukung temuan sebelumnya. Mereka menyimpulkan bahwa Perusahaan yang menggunakan teknologi berbasis cloud dan analitik data dalam pelaporan keuangan dapat menghasilkan laporan yang lebih relevan dan andal. Selain itu, teknologi informasi membantu Perusahaan meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan dan penyajian data keuangan, sehingga meningkatkan kualitas laporan secara keseluruhan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap SAP sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena SAP menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga terbukti mampu mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan.

Berikut ini Penelitian terdahulu Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
M. Zikry Ramadhan, Nurabiah (2024)	Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada OPD BPKAD Pemerintahan Kota Bima	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan metode survey dengan cara memberi kuesioner kepada responden langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang akurat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini, pemanfaatan sistem informasi akuntansi terbukti menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kualitas pelaporan, sementara pemahaman SAP secara tunggal tidak cukup memengaruhi mutu laporan. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia memperkuat efek penggunaan teknologi, sehingga aparatur yang terampil dalam mengoperasikan aplikasi akuntansi menunjukkan capaian pelaporan yang lebih andal dan tepat waktu.

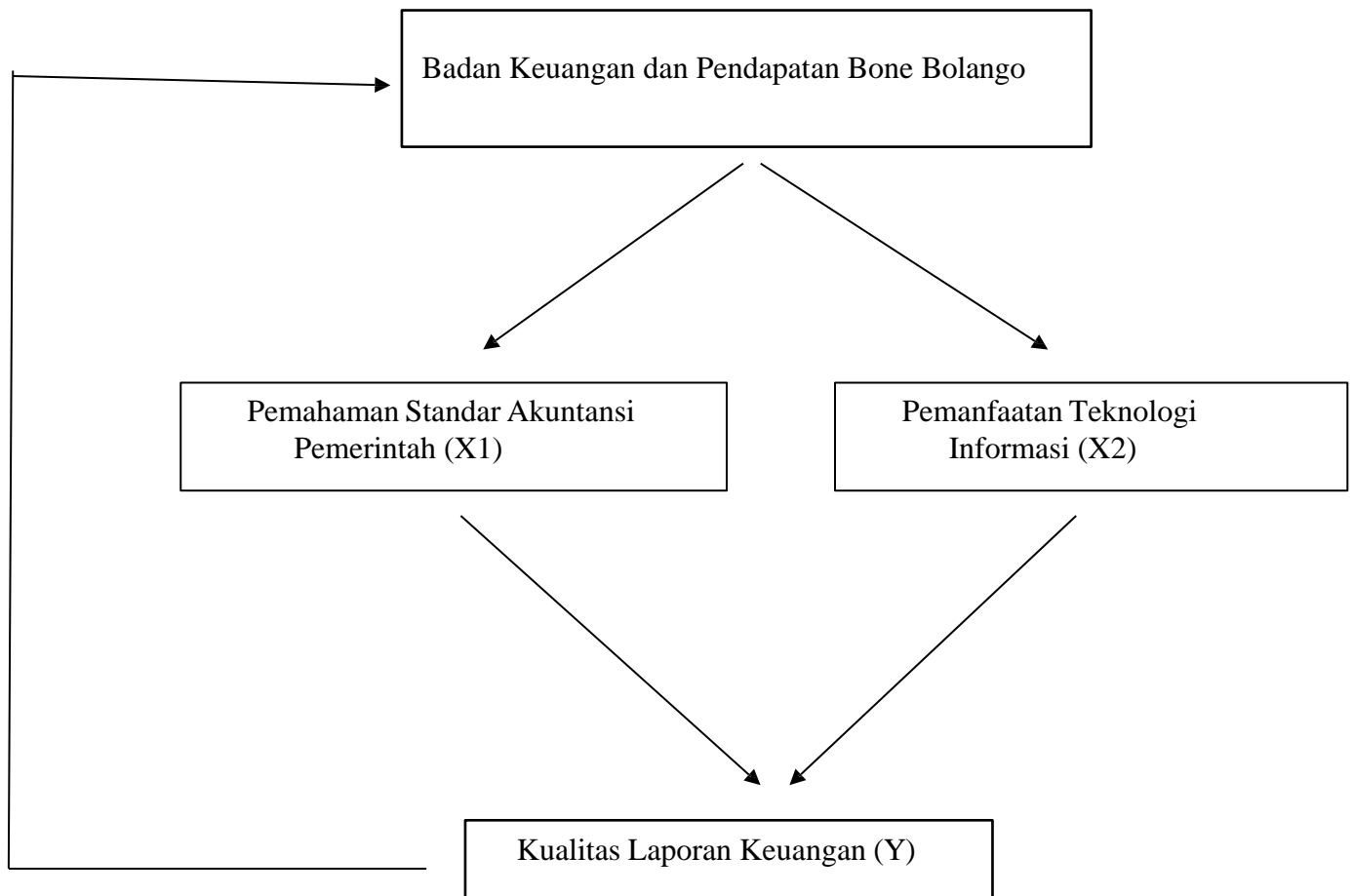
<p>Sandra Jeanet Muntu, Wa Ode Helda, Helda Nelvia, Hasbullah Nirwana, Darmawati (2024)</p>	<p>Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan: Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti jabatan di bagian keuangan dan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Data dikumpulkan melalui survey untuk menganalisis pengaruh berbagai factor terhadap kualitas pemerintah daerah.</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman SAP di kalangan aparatur, semakin baik mutu laporan keuangan yang dihasilkan. Aparatur yang menguasai prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, dan penyajian sesuai SAP mampu menyusun laporan yang lebih transparan dan akuntabel.</p>
---	---	---	--

Harry Apriansyah, Sri Rahayu dan Misni Erwati (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo	Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan sampel jenuh.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara parsial variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penggunaan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo.
---	---	--	---

Rama Ardianto dan Chermian Eforis (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internn Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah	Penelitian ini merupakan penelitian sebab akibat (<i>causal study</i>). Studi yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari satu atau lebih masalah dalam penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah , Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki Pengaruh Signifikan. Namun, secara simultan, kelima variabel tersebut secara Bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
--	--	---	--

	Kabupaten Tangerang)		
Fangela Myas Sari (2022)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah, <i>Good Governance</i> , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang)	Data Penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui metode survey yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Sedangkan Teknik analisis yang digunakan adalah Uji kualitas data, uji asumsi klasik dan regresi berganda.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun untuk variabel kualitas aparatur pemerintah daerah dan <i>Good Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Menurut Ismael Nurdin dan Sri Hartati (2019) dalam Mulyani (2021), hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final, jawaban sementara, dugaan sementara, yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel.

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori, hipotesis yg diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah (Y).

H2 : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah (Y).

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Terdapat dua variabel tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (*independen variabel*) dan variabel terikat (*dependen variabel*).

Variabel bebas yang diteliti adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), sedangkan yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, Moutong, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96119. Alasan pemilihan Lokasi ini adalah karena Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang dianggap dapat mewakili seluruh SKPD di Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, lokasi ini dipilih karena aksesnya mudah dijangkau oleh peneliti, baik dari segi sumber daya maupun efisiensi waktu. Peneliti juga memiliki pengalaman magang di tempat ini, sehingga pemahaman mengenai Lokasi penelitian serta proses pengumpulan data yang diperlukan dapat lebih efektif dan optimal.

3.2 Metode Penelitian

Sugiyono (2019:2), mengemukakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Agar penelitian lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2019:206) pengertian analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskriptifkan data sampel, dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2019:206). Dengan menerapkan metode penelitian tersebut, penulis mencoba menyusun secara sistematis dan menganalisisnya berdasarkan teori yang ada, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan terkait penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Bone Bolango.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausalitas, karena disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebabakibat antar variabel. Menurut Arikunto (2010:15) metode verifikatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan metode penelitian tersebut, bahwa tujuan peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui hubungan antar variabel atau lebih dalam menguji suatu hipotesis melalui alat analisis statistik. Dalam penelitian ini, analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh dari variabel-variabel yang terdiri dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam melakukan penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (*Independen Variable*) dan variabel terikat (*Dependen Variabel*).

1. Variabel Bebas (*Independen Variabel*)

Sugiyono (2019:69) mengemukakan bahwa Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dengan demikian, terdapat dua variabel bebas yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

a) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Tarigan & Nurtanzila (2019) yang dimaksud dengan Standar akuntansi pemerintah dapat didefinisikan Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini bertujuan meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah.

Variabel ini diukur dengan pengukuran menggunakan sistem skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk mengisi 10 pertanyaan yang berkaitan dengan

lima tingkat pemahaman, yaitu: (1) Tidak Memahami (TM), (2) Hanya Sedikit Memahami (HSM), (3) Sedikit Memahami (SM), (4) Memahami (M), dan (5) Sangat Memahami Sekali (SMS). Skor 1 diberikan jika responden merasa benar-benar tidak paham sama sekali tentang standar akuntansi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Sementara itu, skor 5 diberikan jika responden merasa dirinya sudah sangat paham mengenai standar akuntansi pemerintah sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Menurut Sutabri (2014) dalam Zainuddin *et al.* (2023), Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Variabel ini menggunakan sistem skala likert untuk mengukur sikap dan pendapat dari responden. Setiap responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian yaitu: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (KK), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP). Setiap responden diminta untuk menjawab 12 pertanyaan yang berhubungan dengan 5 kategori penilaian, yaitu: (1) TP (Tidak Pernah), (2) JR (Jarang), (3) KK (Kadang-Kadang), (4) SR (Sering), dan (5) SL (Selalu). Skor 1 diberikan ketika responden merasa bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat kurang, misalnya jumlah komputer yang tersedia tidak memadai, jaringan internet

jarang digunakan, proses akuntansi belum terkomputerisasi, dan penggunaan software belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan skor 5 diberikan ketika responden menilai bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah sangat baik, dengan jumlah komputer yang cukup, pemanfaatan internet yang optimal, proses akuntansi yang sudah terkomputerisasi sepenuhnya, serta penggunaan software yang sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Variabel Terikat (*Dependen Variable*)

Menurut Sugiyono (2019:69), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Assad *et al.* (2023), Kualitas laporan keuangan mengacu pada keandalan informasi yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat Keputusan ekonomi. Laporan keuangan berkualitas tinggi memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Variabel ini diukur dengan menggunakan sistem skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 12 pertanyaan dengan lima pilihan jawaban, yaitu: (1) Tidak Pernah (TP), (2) Jarang (JR), (3) Kadang-Kadang (KK), (4) Sering (SR), dan (5) Selalu (SL). Skor 1 diberikan jika responden merasa laporan keuangan yang disajikan tidak relevan, kurang andal, sulit dibandingkan, dan tidak mudah dipahami. Sementara itu, skor 5 diberikan jika responden menilai laporan keuangan

yang disajikan sudah sangat relevan, andal, mudah dibandingkan, serta mudah dipahami.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	1) Neraca 2) Penyajian Laporan Realisasi Anggaran 3) Laporan Arus Kas 4) Penyajian CALK 5) Penilaian Persediaan 6) Pengakuan Investasi 7) Pengakuan Aset Tetap 8) Perlakuan akuntansi kontruksi 9) Perlakuan akuntansi kewajiban 10) Perlakuan Akuntansi koreksi kesalahan	<i>Ordinal</i>
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	1) Jumlah Komputer yang memadai 2) Pemanfaatan jaringan internet 3) Proses Akuntansi yang terkomputerisasi 4) Penggunaan software sesuai ketentuan hukum.	<i>Ordinal</i>
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami	<i>Ordinal</i>

Sumber: Sihasale (2018), Zubaidi *et al.* (2019), Mardiasmo (2019)

3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126). Dalam penelitian ini populasi yang akan di ambil adalah seluruh staf pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebanyak 96 orang.

Tabel 3.2 Populasi BKPD

No	Keterangan	Jumlah
1.	Bidang Akuntansi	10 orang
2.	Bidang Aset	13 orang
3.	Bidang Sekretaris	20 orang
4.	Bidang Pendapatan	27 orang
5.	Bidang Perbendaharaan	15 orang
6.	Bidang Perencanaan Anggaran	11 orang
	Total	96 orang

Sumber: Badan Keuangan dan Pendapatan Bone Bolango

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel yaitu pegawai yang bekerja di BKPD Bone Bolango, latar belakang Pendidikan minimal S1, dan lama bekerja lebih dari 3 tahun. Metode ini

dipilih karena penelitian ini membutuhkan partisipan yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Sampel dipilih secara sengaja untuk memastikan bahwa responden yang terlibat benar-benar memahami konteks teknis dan operasional dari SAP serta penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

Tabel 3.3 Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Bidang Akuntansi	7 orang
2.	Bidang Aset	7 orang
3.	Bidang Sekretaris	6 orang
4.	Bidang Pendapatan	7 orang
5.	Bidang Perbendaharaan	1 orang
6.	Bidang Perencanaan Anggaran	7 orang
	Total	35 orang

Sumber: Badan Keuangan dan Pendapatan Bone Bolango

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Jika dilihat dari sumber datanya, peneliti menggunakan sumber data primer. Menurut Sugiyono (2019:9) mengemukakan bahwa Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui penyebaran kuesioner, wawancara, atau observasi langsung terhadap

objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap responden staf Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019:296). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), dan kuesioner (angket).

1. Observasi

Sugiyono (2019:203) mengemukakan bahwa: “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:195) mengatakan bahwa : “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/kecil. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada beberapa orang yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan Bersama Ibu Sherly, SE, M.S.A. selaku Kepala Subbidang Akuntansi dan Ibu Sasmita Bakri, SE selaku Kepala Subbidang Aset

3. Kuisisioner

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah bentuk kuisisioner. Menurut Sugiyono (2019:199) mengatakan bahwa : “Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

3.3 Uji Kualitas Data

3.3.1 Uji Validitas

Untuk menilai kelayakan kuisisioner yang telah disebarkan, harus dilakukan uji validitas. Uji ini bertujuan mengevaluasi keabsahan setiap pertanyaan dalam kuisisioner, memastikan bahwa setiap butir pertanyaan memang mengukur aspek yang dimaksud. Pengukuran validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi Product Moment Pearson (Ghozali, 2018), dengan cara membandingkan skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor.

Sebuah butir pertanyaan dianggap valid apabila nilai signifikansi (sig.) hasil Pearson berada di bawah 0,05 (5%). Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka butir tersebut dinyatakan tidak valid. Selain itu, penilaian validitas juga dapat dilihat dari perbandingan antara r hitung dan r tabel:

- 1) Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka butir kuesioner tersebut valid.
- 2) Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka butir kuesioner tersebut tidak valid.

3.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2013).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach alpha dari masing-masing instrument dalam setiap variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* $> 0,60$. Menurut Ghozali (2018) menunjukkan bahwa *alpha Cronbach* dapat diterima jika $> 0,6$. Semakin dekat *alpha Cronbach* dengan 1, semakin tinggi keandalan konsisten internal.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dimana analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara mentabulasi data ke tabel. Selain itu analisis deskriptif juga menyajikan dalam bentuk item pernyataan berupa kuesioner yang dianalisis memiliki rentang skala antara 1- 5

dengan jumlah sampel. Setelah skor tiap komponen terkumpul melalui kuesioner, maka rentang skala diolah dengan rumus:

$$RS = n \frac{(m-1)}{m}$$

Keterangan :

RS = Rentang Skala

n = Jumlah Sampel

m = Jumlah alternative jawaban tiap item

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Sumber: Sugiyono (2016:192)

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (Kualitas Laporan Keuangan)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Variabel Bebas (Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah)

X_2 = Variabel Bebas (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

e = Standar error / variabel pengganggu

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi sebelum menggunakan analisis linier berganda (*multiple linier regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti, terdiri atas:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independent dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal. Selain itu, pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik histogram, dan grafik normal probability plot.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/\text{tolerance}$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* dan uji *glejser*.

Uji *scatterplot* dilakukan dengan memvisualisasikan sebaran residual (sumbu Y) terhadap nilai prediksi (sumbu X). Metode uji *glejser* dilakukan dengan menguji hubungan antara nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika hasil regresi menunjukkan ada variabel independen yang signifikan ($p\text{-value} < 0,05$), disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak signifikan, model dinyatakan aman. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.4.5 Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji T (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang

diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2010). T-statistics merupakan suatu nilai yang digunakan guna melihat tingkat signifikansi pada pengujian hipotesis dengan cara mencari nilai T-statistics melalui prosedur bootstrapping. Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai T-statistics lebih besar dari 1,96, sedangkan jika nilai T-statistics kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2016).

3. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan menilai sejauh mana model mampu menjelaskan pengaruh gabungan variabel–variabel independen terhadap variabel dependen, yang tercermin dari nilai adjusted R-squared (Ghozali, 2016). Koefisien ini menggambarkan proporsi variasi pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model regresi. Pada tabel Model Summary, nilai R-square (R^2) menunjukkan besaran kontribusi tersebut. Menurut Ghozali (2016), apabila nilai R^2 mendekati nol, kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas; sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel bebas hampir sepenuhnya mampu memberikan informasi untuk memprediksi variabel terikat.

Uji R^2 dilakukan untuk memperkirakan besar kontribusi simultan variabel independen terhadap variabel dependen, dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang tinggi—mendekati 1—mengindikasikan variabel–variabel independen telah menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk prediksi variabel

dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah menandakan keterbatasan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perilaku variabel terikat (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango dibentuk sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah Kabupaten Gorontalo menjadi Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Lembaga ini secara resmi mulai beroperasi setelah penetapan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BKPD memiliki tugas utama mengelola keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran (APBD), pemantauan realisasi belanja, serta penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada fase awal (2004-2010), fokus BKPD adalah membangun sistem administrasi keuangan yang akuntabel, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. BKPD Bone Bolango aktif menyesuaikan kebijakan dengan perubahan perundang-undangan nasional, seperti penerapan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Hingga saat ini, BKPD Bone Bolango terus berkomitmen mendukung

Pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi

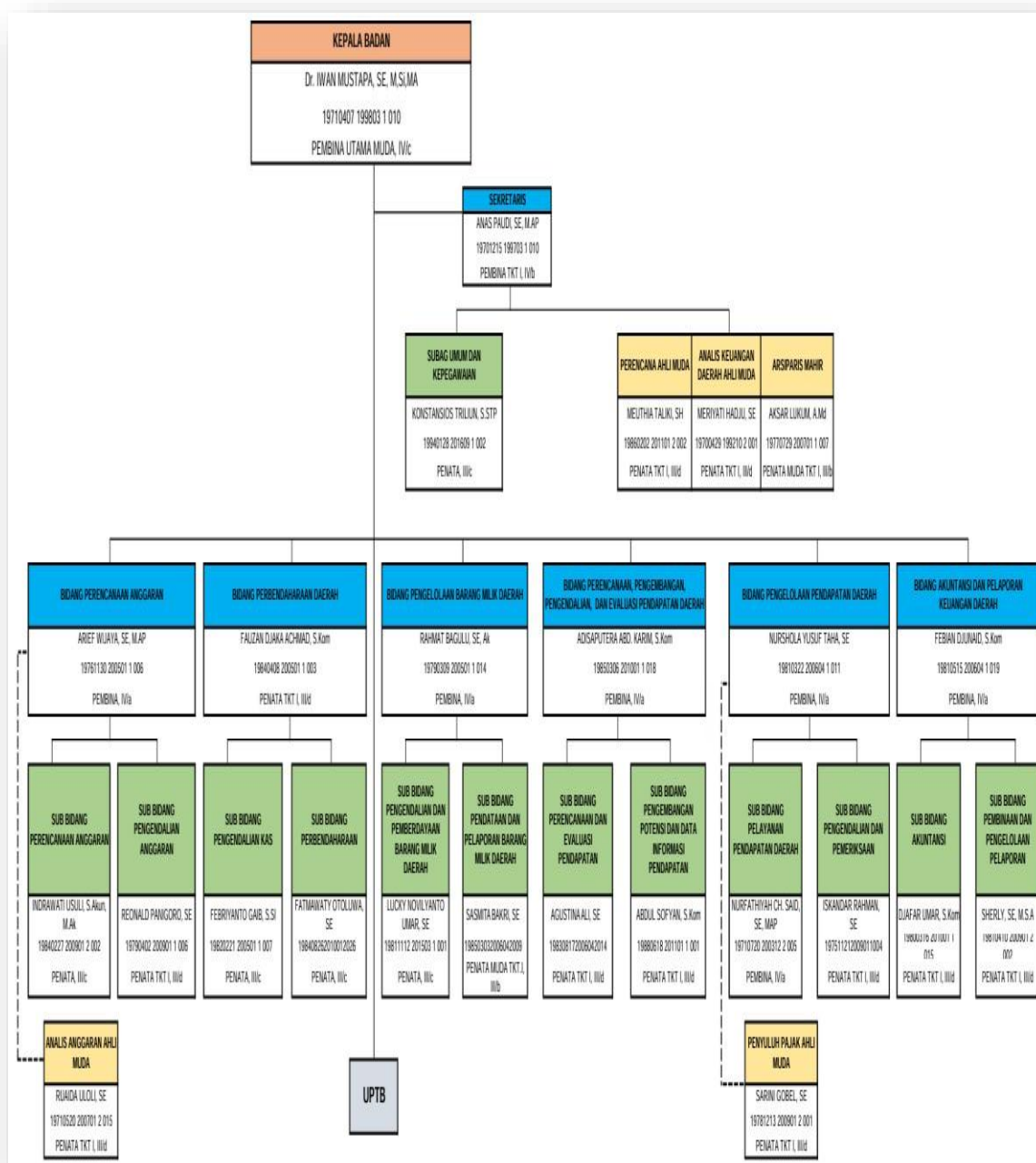
Bone Bolango Maju Cemerlang

Misi

1. Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan Sejahtera;
2. Memperkokoh Infrastruktur dan pembangunan Kawasan yang berbasis pelestarian Sumber Daya Alam;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing merata dan berkeadilan;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan digital

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKPD Bone Bolango



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Profil Responden

Data deskriptif penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebanyak 35 responden. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskriptif profil responden. Profil Responden diklasifikasikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan lama berkerja di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
2. Berdasarkan latar belakang pendidikan para pegawai/aparatur pemerintah daerah

Adapun data peneliti peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Presentase
1-2 Tahun	0	0
3-4 Tahun	6	17%
> 4 Tahun	29	83%
Total	35	100%

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa masa aktif pegawai >4 tahun merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu 83% sedangkan

terendah yaitu masa aktif 3-4 tahun yakni 17%. Dalam penelitian ini, tidak ada responden yang memiliki masa kerja 1-2 tahun (0%).

Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Presentase
Diploma	2	6%
S1	29	83%
S2	4	11%
Total	35	100%

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden dengan latar belakang pendidikan S1 merupakan responden terbanyak penelitian ini yaitu 83% sedangkan terendah yaitu latar belakang pendidikan Diploma dengan persentase 6%.

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Menurut sugiyono (2022) analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Data yang terkumpul kemudian ditabulasikan dan didiskusikan secara deskriptif.

Untuk jawaban atau tanggapan responden dapat diketahui dengan pembuatan kategori *true score* dengan menggunakan nilai maximum dikurangi nilai minimum. Hasil yang di dapat dibagi 5 sesuai dengan kategori yang diinginkan, hasil tersebut yang dijadikan nilai jenjang penyekoran. Dari hasil kusioner yang telah dibagikan diketahui bahwa skor tertinggi 179 dan skor terendah 35, maka

diperoleh diantara keduanya yaitu 140, kemudian dibagi 5 dan ditemukan hasil sebesar 28. Perhitungan mengenai rentang skala adalah sebagai berikut:

$$RS = n \frac{(m-1)}{m}$$

$$RS = \frac{35(5-1)}{5} = 28$$

Tabel 4. 3 Skala Penilaian

Skor	Penilaian
35 – 63	Sangat Rendah
64 – 92	Rendah
93 – 121	Sedang
122 – 150	Tinggi
151 – 179	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2025

Berikut deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pernyataan pada masing-masing variabel.

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Instrumen untuk variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah diukur berdasarkan 10 pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil evaluasi atas pernyataan-pernyataan tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Distribusi Jawaban Responden Variabel X1

Skala	Pernyataan 1			Skala	Pernyataan 2			Skala	Pernyataan 3		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	15	75	43%	5	15	75	43%	5	6	30	17%
4	12	48	34%	4	12	48	34%	4	14	56	40%
3	7	21	20%	3	7	21	20%	3	10	30	29%
2	5	10	3%	2	1	2	3%	2	5	10	14%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	154	100%	Jumlah	35	146	100%	Jumlah	35	126	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Tinggi			Kriteria	Tinggi		

Skala	Pernyataan 4			Skala	Pernyataan 5			Skala	Pernyataan 6		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	8	40	23%	5	5	25	14%	5	2	10	6%
4	13	52	37%	4	18	72	51%	4	16	64	46%
3	11	33	31%	3	7	21	20%	3	10	30	28%
2	3	6	9%	2	5	10	14%	2	6	12	17%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	1	1	3%
Jumlah	35	131	100%	Jumlah	35	128	100%	Jumlah	35	117	100%
Kriteria	Tinggi			Kriteria	Tinggi			Kriteria	Sedang		

Skala	Pernyataan 7			Skala	Pernyataan 8			Skala	Pernyataan 9		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	8	40	23%	5	5	25	14%	5	7	35	20%
4	15	60	37%	4	11	44	31%	4	15	60	43%
3	8	24	31%	3	13	39	37%	3	11	33	31%
2	4	8	9%	2	3	6	9%	2	2	4	6%
1	0	0	0%	1	3	3	9%	1	0	0	0%
Jumlah	35	132	100%	Jumlah	35	117	100%	Jumlah	35	132	100%
Kriteria	Tinggi			Kriteria	Sedang			Kriteria	Tinggi		

Skala	Pernyataan 10		
	F	S x F	%
5	5	25	14%
4	13	52	37%
3	13	39	37%
2	4	8	11%
1	0	0	0%
Jumlah	35	124	100%
Kriteria	Tinggi		

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, terlihat jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 35 responden. Tabel distribusi pada variabel X1 menunjukkan adanya 3 kriteria yang muncul, dengan kriteria utama adalah “Sangat Tinggi”. Dalam kriteria ini terdapat 7 pernyataan yang mendapatkan kriteria yang hampir mencapai dalam skor maximum, dan 2 pernyataan yang mendapatkan kriteria sedang yaitu pada pernyataan 6 dan 8. Sementara itu, pernyataan yang mencapai rata-rata sangat tinggi berada pada pernyataan 1 dengan skor 154, yaitu “Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Neraca”. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman responden mengenai neraca sangat tinggi. Namun, pada pernyataan 6 dan 8 dengan skor sama yaitu 117 yang masuk dalam kriteria sedang, menunjukkan bahwa pemahaman sebagian pegawai mengenai investasi dan konstruksi dalam pengerjaan perlu ditingkatkan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Instrumen untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur berdasarkan 12 pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil evaluasi atas pernyataan-pernyataan tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Distribusi Jawaban Responden Variabel X2

Skala	Pernyataan 1			Skala	Pernyataan 2			Skala	Pernyataan 3		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	15	75	43%	5	18	90	51%	5	12	60	34%
4	17	68	49%	4	15	60	43%	4	18	72	51%
3	3	9	9%	3	2	6	6%	3	5	15	14%
2	0	0	0%	2	0	0	0%	2	0	0	0%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	152	100%	Jumlah	35	156	100%	Jumlah	35	147	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Tinggi		

Skala	Pernyataan 4			Skala	Pernyataan 5			Skala	Pernyataan 6		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	14	70	40%	5	14	70	40%	5	12	60	34%
4	19	76	54%	4	17	68	49%	4	16	64	46%
3	2	6	6%	3	4	12	11%	3	6	18	17%
2	0	0	0%	2	0	0	0%	2	1	2	3%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	152	100%	Jumlah	35	150	100%	Jumlah	35	144	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Tinggi			Kriteria	Tinggi		

Skala	Pernyataan 7			Skala	Pernyataan 8			Skala	Pernyataan 9		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	17	85	49%	5	13	65	37%	5	11	55	31%
4	17	68	49%	4	16	64	46%	4	16	64	46%
3	1	3	2%	3	6	18	17%	3	8	24	23%
2	0	0	0%	2	0	0	0%	2	0	0	0%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	156	100%	Jumlah	35	147	100%	Jumlah	35	143	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Tinggi			Kriteria	Tinggi		

Skala	Pernyataan 10			Skala	Pernyataan 11			Skala	Pernyataan 12		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	20	100	57%	5	15	75	43%	5	21	105	60%
4	15	60	43%	4	17	68	48%	4	13	52	37%
3	0	0	0%	3	3	9	9%	3	1	3	3%
2	0	0	0%	2	0	0	0%	2	0	10	0%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	160	100%	Jumlah	35	152	100%	Jumlah	35	160	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi		

Dilihat pada tabel 4.5 diatas, distribusi pada variabel X1 menunjukkan adanya 2 kriteria yang muncul, dimana kriteria terbanyak yang muncul adalah “Sangat Tinggi”. Dalam kriteria ini terdapat 7 pernyataan yang mendapatkan kriteria yang hampir mencapai skor maximum, dan 5 pernyataan yang mendapatkan kriteria tinggi. Sementara itu, pernyataan yang memiliki rata-rata tertinggi berada pada pernyataan 10 dan 12 dengan skor sama yaitu 160. Hal ini menunjukkan bahwa Software akuntansi yang digunakan di BKPD Bone Bolango telah memenuhi standar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Kualitas Laporan Keuangan

Instrumen untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan diukur berdasarkan 12 pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil evaluasi atas pernyataan-pernyataan tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Distribusi Jawaban Responden Variabel Y

Skala	Pernyataan 1			Skala	Pernyataan 2			Skala	Pernyataan 3		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	21	105	60%	5	24	120	68%	5	20	100	57%
4	12	48	34%	4	10	40	29%	4	13	52	37%
3	2	6	6%	3	1	3	3%	3	2	6	6%
2	0	0	0%	2	0	0	0%	2	0	0	0%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	159	100%	Jumlah	35	163	100%	Jumlah	35	158	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi		

Skala	Pernyataan 4			Skala	Pernyataan 5			Skala	Pernyataan 6		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	15	75	43%	5	18	90	51%	5	14	70	40%
4	17	68	48%	4	12	48	34%	4	19	76	54%
3	2	6	6%	3	4	12	11%	3	2	6	6%
2	1	2	3%	2	1	2	3%	2	0	0	0%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	151	100%	Jumlah	35	152	100%	Jumlah	35	152	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi		

Skala	Pernyataan 7			Skala	Pernyataan 8			Skala	Pernyataan 9		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	18	90	51%	5	13	65	37%	5	15	75	42%
4	12	48	34%	4	16	64	46%	4	17	68	48%
3	5	15	14%	3	6	18	17%	3	2	6	6%
2	0	0	0%	2	0	0	0%	2	1	2	3%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	153	100%	Jumlah	35	147	100%	Jumlah	35	151	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi		

Skala	Pernyataan 10			Skala	Pernyataan 11			Skala	Pernyataan 12		
	F	S x F	%		F	S x F	%		F	S x F	%
5	16	80	46%	5	14	90	40%	5	15	75	42%
4	19	76	54%	4	20	80	57%	4	17	68	49%
3	0	0	0%	3	1	3	3%	3	3	9	9%

2	0	0	0%	2	0	0	0%	2	0	0	0%
1	0	0	0%	1	0	0	0%	1	0	0	0%
Jumlah	35	156	100%	Jumlah	35	173	100%	Jumlah	35	146	100%
Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Sangat Tinggi			Kriteria	Tinggi		

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa kriteria skor tertinggi terdapat pada pernyataan 11 dengan rata-rata jawaban responden adalah 173. Tabel distribusi tersebut menunjukkan adanya 2 kriteria yang muncul, yaitu tinggi dan sangat tinggi. Rata-rata jawaban responden dalam instrument variabel Y menunjukkan kriteria skor rata-rata nya sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan di BKPD Bona Bolango relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Walaupun terdapat 2 pernyataan yang rata-rata nya “tinggi” namun kriteria skor nya hampir mencapai skor maximum.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation. Setiap butir dikatakan valid apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Tabel di bawah ini menampilkan hasil uji validitas untuk ketiga variabel penelitian pemahaman standar akuntansi pemerintah (PSAP), pemanfaatan teknologi informasi (PTI), dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLK) berdasarkan 35 responden.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel PSAP

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2- tailed)	Keterangan
PSAP1	0,783	0,001	Valid
PSAP2	0,748	0,001	Valid
PSAP3	0,731	0,001	Valid
PSAP4	0,740	0,001	Valid
PSAP5	0,904	0,001	Valid
PSAP6	0,741	0,001	Valid
PSAP7	0,825	0,001	Valid
PSAP8	0,874	0,001	Valid
PSAP9	0,788	0,001	Valid
PSAP10	0,687	0,001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan terhadap instrumen penelitian pada variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.7. Setiap butir pertanyaan pada variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah, menunjukkan nilai koefisien korelasi Pearson (Pearson Correlation) antara 0,687 hingga 0,904, yang artinya setiap butir pertanyaan telah sesuai dengan indikator variabel yang diteliti.

Selain itu, nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) yang diperoleh untuk seluruh butir pertanyaan adalah sebesar 0,001. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan batas signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, berdasarkan kriteria yang digunakan, seluruh butir pertanyaan pada variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah dinyatakan valid.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel PTI

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
PTI1	0,840	0,001	Valid
PTI2	0,751	0,001	Valid
PTI3	0,742	0,001	Valid
PTI4	0,813	0,001	Valid
PTI5	0,627	0,001	Valid
PTI6	0,751	0,001	Valid
PTI7	0,648	0,001	Valid
PTI8	0,761	0,001	Valid
PTI9	0,463	0,005	Valid
PTI10	0,545	0,001	Valid
PTI11	0,629	0,001	Valid
PTI12	0,531	0,001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang disajikan dalam Tabel 4.8, seluruh butir pertanyaan PTI1 hingga PTI12 menunjukkan nilai korelasi Pearson antara 0,463 hingga 0,840. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap item memiliki hubungan yang cukup kuat dengan total skor variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu, seluruh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) yang diperoleh berada di bawah angka 0,05, yaitu sebesar 0,001 untuk sebagian besar butir, dan 0,005 pada PTI9. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan pada variabel PTI dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel KLIK

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2- tailed)	Keterangan
KLK1	0,741	0,001	Valid
KLK2	0,755	0,001	Valid
KLK3	0,754	0,001	Valid
KLK4	0,708	0,001	Valid
KLK5	0,866	0,001	Valid
KLK6	0,777	0,001	Valid
KLK7	0,822	0,001	Valid
KLK8	0,777	0,001	Valid
KLK9	0,764	0,001	Valid
KLK10	0,611	0,001	Valid
KLK11	0,677	0,001	Valid
KLK12	0,782	0,001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap instrumen variabel Kualitas Laporan Keuangan yang ditampilkan pada Tabel 4.10, seluruh butir pertanyaan KLK1 sampai KLK12 menunjukkan nilai korelasi Pearson antara 0,611 hingga 0,866. Nilai-nilai tersebut menandakan adanya hubungan yang cukup kuat antara masing-masing item pertanyaan dengan total skor variabel Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, seluruh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,001, yang berarti jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu nilai signifikansi kurang dari 0,05.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen dapat dinyatakan memenuhi syarat reliabilitas apabila koefisien *Cronbach's Alpha* yang diperoleh melebihi angka 0,60 (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	0,929	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,890	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,930	Reliabel

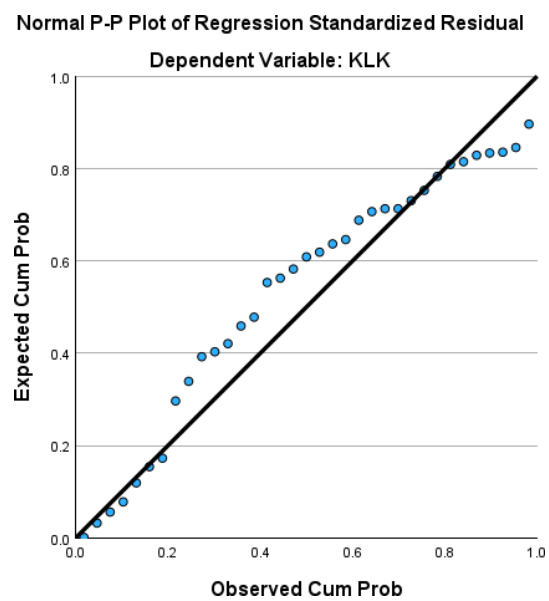
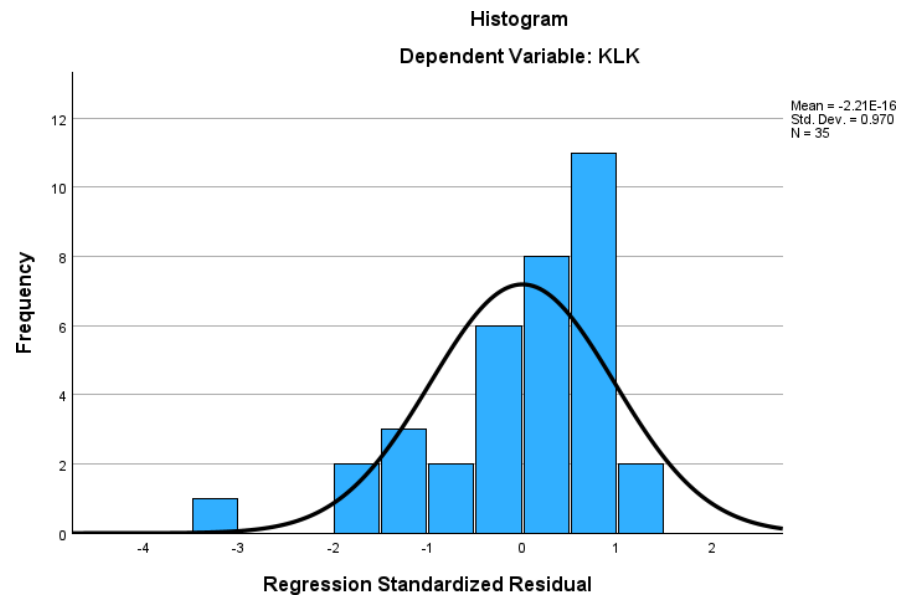
Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang tercantum pada Tabel 4.11, seluruh variabel penelitian, yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan, memperoleh nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel PSAP sebesar 0,929, PTI sebesar 0,890, dan KLK sebesar 0,930. Dengan demikian, instrumen yang digunakan pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas residual model regresi, dilakukan analisis secara visual melalui grafik histogram dan *normal probability plot* (P-P plot), serta uji statistik Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 4. 2 Hasil Uji Grafik Histogram dan P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Tabel 4. 11 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			PSAP	PTI	KLK
N			35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		36,77	51,97	52,63
	Std. Deviation		7,268	5,221	5,776
Most Extreme Differences	Absolute		,135	,109	,103
	Positive		,101	,108	,101
	Negative		-,135	-,109	-,103
Test Statistic			,135	,109	,103
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.109	,200 ^e	,200 ^e
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.106	,355	,441
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,098	,343	,428
		Upper Bound	,113	,368	,454

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 4.1 dan pada Tabel 4.12 diatas, dimana terdapat 2 gambar yaitu Grafik Histogram dan P-Plot dan 1 Tabel Kolmogorov-Smirnov. Untuk penjelasan lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Hasil uji normalitas yang ditampilkan melalui histogram menunjukkan bahwa distribusi residual terstandarisasi pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (KLK) membentuk pola menyerupai kurva normal (bell-shaped). Mayoritas data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, sedangkan frekuensi pada bagian ekstrem kiri dan kanan relatif sedikit serta nilai rata-rata residual sangat mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa data

residual cenderung tersebar secara simetris di sekitar rata-rata, yang merupakan salah satu ciri distribusi normal.

- b. Hasil Normal P-P Plot juga memperlihatkan bahwa titik-titik data sebagian besar mengikuti garis diagonal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik di bagian tengah dan ujung. Namun, secara keseluruhan, pola sebaran titik tersebut masih cukup dekat dengan garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi menyebar secara normal.
- c. Interpretasi visual kedua gambar tersebut diperkuat oleh hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov yang tercantum pada Tabel 4.12. Nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) untuk variabel kualitas laporan keuangan (KLK) sebesar 0,200, sementara untuk variabel lainnya juga menunjukkan angka di atas 0,05. Dengan demikian, seluruh nilai signifikansi lebih besar dari batas signifikansi 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara distribusi data dengan distribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mengidentifikasi adanya masalah multikolinearitas, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), serta analisis kuatnya korelasi di antara variabel- variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan mengevaluasi nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

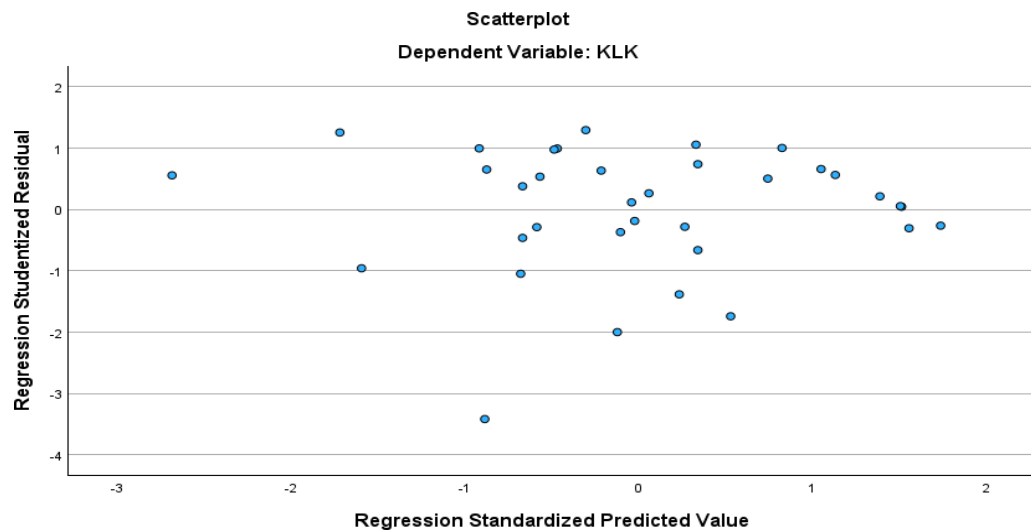
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,962	1,040
	X2	,962	1,040

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4.13, nilai Tolerance untuk variabel X1 dan X2 masing-masing sebesar 0,962, sedangkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk kedua variabel tersebut adalah 1,040. Nilai Tolerance yang diperoleh jauh di atas batas minimum 0,10, dan nilai VIF juga berada jauh di bawah ambang batas maksimum 10.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode yaitu *scatterplot* dan uji glejser. Uji *scatterplot* dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Sedangkan uji glejser dilakukab dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas dan apabila nilai sig < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 4. 3 Hasil Uji Grafik Scatterplot

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Tabel 4. 13 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,639	4,566		2,549	,016
	PSAP	-,045	,059	-,129	-,758	,454
	PTI	-,144	,085	-,287	-1,691	,101
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan gambar grafik scatterplot dan tabel uji glejser diatas, berikut penjelasan mengenai hasil uji heteroskedastisitas:

- a. Pada gambar 4.2, dapat dilihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol. Tidak tampak adanya pola tertentu seperti menyebar melebar, mengerucut, atau membentuk pola sistematis lainnya. Penyebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan di seluruh rentang nilai prediksi, sehingga secara visual model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.
- b. Hasil analisis scatter tersebut diperkuat dengan uji statistik Glejser yang ditampilkan pada Tabel 4.14. Nilai signifikansi untuk variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) sebesar 0,454 dan untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) sebesar 0,101, keduanya jauh di atas batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai absolut residual dengan variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas secara statistik.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model yang dibangun. Pada tabel 4.9 menyajikan hasil uji statistik F variabel Y, X1, dan X2.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi variabel Y, X1 dan X2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,796 ^a	,634	,611	3,661

a. Predictors: (Constant), PTI, PSAP

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi diatas, terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,796 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen (PSAP dan PTI) dengan variabel dependen (KLK). Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,634, yang berarti bahwa variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (KLK) sebesar 63,4%, sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

1. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F simultan bertujuan untuk menilai apakah variabel-variabel independent secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam suatu model. Penentuan Keputusan dalam pengujian ini didasarkan pada nilai F yang tercantum dalam tabel INOVA, dengan Tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.

Tabel 4. 15 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	743,167	2	371,584	27,717	,001 ^b
	Residual	429,004	32	13,406		
	Total	1172,171	34			

a. Dependent Variable: KKK

b. Predictors: (Constant), PTI, PSAP

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.16, hasil uji F simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 27,717 dimana F hitung $27,717 >$ nilai F tabel 3,29 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,001. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa secara statistik, model regresi yang melibatkan variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah (Y).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1), yaitu "Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah," diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang diuji bersama-sama mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

2. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk menilai pengaruh variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi, dimana uji ini melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel tersebut.

Tabel 4. 16 Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,343	6,589		,659	,515
	PSAP	,117	,088	,144	1,324	,195
	PTI	,849	,123	,755	6,925	,001

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data primer yang diolah (SPSS v.30, 2025)

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk memperoleh nilai, dapat dilihat sebagai berikut.

$$T \text{ tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$a = 5\% = t(0,05/2 ; 35-2-1)$$

$$= 0,025 ; 32$$

$$= 2,036$$

Berdasarkan hasil uji t parsial yang tercantum pada Tabel 4.17, menunjukkan bahwa Nilai t hitung untuk variabel X1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) adalah sebesar 1,324 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,195. Sementara itu, nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) 32 adalah 2,036. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,324 < 2,036$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,195 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak.

Sedangkan untuk hasil uji hipotesis 3 variabel X2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), nilai t hitung adalah 6,925 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,001. Nilai t hitung ini jauh lebih besar dari t tabel ($6,925 > 2,036$) dan nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

4.2.5 Persamaan Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan suatu metode analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas dalam modelnya. Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk mengidentifikasi arah hubungan serta mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 4.11, dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 4,434 + 0,117X_1 + 0,849X_2 + e$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut, penjelasan lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 4,434, yang berarti terdapat pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan apabila semua variabel independent yang yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan adalah 4,434.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) adalah sebesar 0,117. Hal ini menunjukkan apabila Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Kualitas Laporan Keuangan naik sebesar 0,117 dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) adalah sebesar 0,849. Hal ini menunjukkan apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Kualitas

Laporan Keuangan akan naik sebesar 0,849 dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap konstan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil Uji hipotesis satu dapat dilihat pada Tabel 4.16, berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai F-hitung sebesar 27,717 dengan signifikansi (p-value) = 0,001 ($< 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,634 menyatakan bahwa 63,4% variabilitas kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh kombinasi pemahaman SAP dan pemanfaatan TI, sementara sisanya (36,6%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, atau faktor eksternal lainnya. Nilai F-hitung yang jauh lebih tinggi daripada F-tabel menegaskan bahwa model regresi yang memasukkan kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama. Dengan kata lain, kedua variabel bebas tersebut secara simultan mampu memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variasi perubahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

Hasil penelitian ini menguatkan hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan

kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, melainkan merupakan hasil sinergi antara pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi yang berlaku dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Penelitian ini juga memperkuat argumen Rachmawati dan Anik (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan TI menjadi faktor dalam meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, bahkan ketika pemahaman SAP belum optimal. Di Kabupaten Bone Bolango, penggunaan aplikasi SIMDA dan jaringan internet yang stabil memungkinkan proses rekonsiliasi data antar-bidang berlangsung efisien, meskipun sebagian pegawai masih mengandalkan metode manual. Selain itu, penelitian empiris oleh Siallagan (2022) pada Pemerintah Kota Sibolga memberikan bukti bahwa peningkatan pemahaman para aparat pembuat laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah, dikombinasikan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Siallagan menekankan bahwa teknologi informasi bukan hanya alat bantu, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama secara simultan, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemahaman standar akuntansi memberikan landasan normatif yang memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, sedangkan

teknologi informasi menyediakan sarana teknis yang memungkinkan proses penyusunan laporan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

4.3.2 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil Uji hipotesis dua dapat dilihat pada Tabel 4.17, berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) memiliki nilai t hitung sebesar 1,324 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,195. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel sebesar 2,036, dan nilai signifikansi yang diperoleh juga lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan seperangkat prinsip dan pedoman yang wajib diikuti dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Penerapan SAP yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman SAP secara individu di kalangan pegawai BKPD Bone Bolango belum mampu menjadi faktor penentu utama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan melalui kondisi faktual yang terjadi di lingkungan kerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, diketahui bahwa dari total sampel yg disebar, hanya pegawai di Bidang Akuntansi dan beberapa pegawai tertentu yang benar- benar memahami substansi standar SAP. Mayoritas pegawai di unit lain termasuk bidang aset, perencanaan, pendapatan, dan sekretaris mengaku hanya mengetahui garis besar tanpa penguasaan mendalam terhadap prinsip, ketentuan, atau teknis pencatatan yang ditetapkan SAP. Hal ini menyebabkan kontribusi pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan secara keseluruhan menjadi kurang optimal, karena proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan kolaborasi lintas bidang yang sama-sama memahami dan menerapkan standar akuntansi secara konsisten.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ibu Sherly, SE, M.S.A. selaku Kepala Subbidang Akuntansi dan Ibu Sasmita Bakri, SE selaku Kepala Subbidang Aset menguatkan temuan penelitian ini. Keduanya menyatakan bahwa, setiap bidang di BKPD memiliki tanggung jawab operasional yang spesifik, seperti pengelolaan aset tetap, perencanaan anggaran, atau pemungutan pendapatan. Pembagian tugas yang spesifik di masing-masing bidang tersebut kemungkinan yang membuat beberapa pegawai lebih fokus pada tugas rutinnya, sehingga kurang memperdalam pemahaman terhadap SAP.

Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, sebagian besar proses penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui aplikasi akuntansi terintegrasi yang sudah diprogram menyesuaikan kerangka SAP. Dengan adanya preset otomatisasi, pegawai hanya perlu memasukkan data dasar (jumlah, kode rekening, periode) kemudian sistem yang akan menjamin kepatuhan terhadap SAP dalam penyusunan jurnal dan neraca. Oleh karena itu, variasi tingkat pemahaman individu terhadap prinsip SAP hanya sedikit memengaruhi keluaran akhir, proses validasi teknis dan alur kerja (workflow) digital lebih dominan menentukan konsistensi serta akurasi laporan. Kondisi ini menyebabkan hubungan langsung antara pemahaman manual dengan kualitas laporan melemah, karena aspek “manusia” telah banyak digantikan oleh algoritma dan checklist sistem. Kondisi ini menyebabkan kontribusi pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan menjadi kurang optimal jika dilihat secara parsial. Dengan kata lain, meskipun aplikasi keuangan telah membantu memastikan laporan keuangan tersusun sesuai standar, pemahaman mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintah belum merata di seluruh bidang, sehingga tidak berdampak signifikan secara individu terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa temuan sebelumnya diantaranya penelitian oleh Ramadhan & Nurabiah (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kota Bima. Selain itu, Halim & Wulandari (2021) juga menemukan hal yg serupa, dimana pemahaman SAP tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di BKPD

Kabupaten Sidoarjo. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Jauhari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pemahaman SAP secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan di badan keuangan dan pendapatan daerah.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial belum menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas laporan keuangan di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu, hipotesis 2 (H2) "Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)" ditolak.

4.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil Uji hipotesis dua dapat dilihat pada Tabel 4.17, berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t hitung sebesar 6,925, yang jauh melebihi nilai t tabel sebesar 2,036. Selain itu, nilai signifikansi (p -value) untuk variabel ini adalah 0,001, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, secara statistik, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,849 dengan nilai beta 0,755 menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan sangat kuat. Artinya,

semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem dan aplikasi keuangan, seperti SIMDA, telah mempermudah proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara lebih akurat, efisien, dan tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga berperan dalam mempercepat proses pelaporan dan memudahkan akses informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, data keuangan dapat dikelola secara langsung dan lebih transparan, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi baik oleh manajemen maupun pihak eksternal.

Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kemampuan pegawai/aparatur dalam penggunaan aplikasi keuangan perlu terus dilakukan agar manfaat teknologi informasi dapat dioptimalkan secara maksimal.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan "Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pentingnya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan

daerah untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,563. Artinya, kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 56,3% variasi kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini
2. Secara parsial, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,195 ($> 0,05$)
3. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BKPD Kabupaten Bone Bolango perlu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi terkait Standar Akuntansi Pemerintah secara rutin, khususnya bagi pegawai di bidang non-akuntansi, agar pemahaman SAP semakin merata dan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dilakukan, baik melalui pembaruan sistem aplikasi keuangan seperti SIMDA maupun pelatihan penggunaan fitur terbaru kepada seluruh pegawai, sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Manajemen BKPD diharapkan mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menyediakan sarana dan prasarana penunjang agar seluruh pegawai dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam pelaporan keuangan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, seperti kompetensi sumber daya manusia, pengawasan internal, dan budaya organisasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo*, 44-62.
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 95-136.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sugeng Seto.
- Arza, O., Syafitri, Y., & Meyla, D. N. (2021). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang*, 519-542.
- Assad, N., Jaafar, A., & Zervopoulos, P. (2023). *The Interplay Of Financial Reporting Quality And Investment Efficiency: Evidence From The USA*.
- Asyik, N. F., Agustia, D., & Muchlis, M. (2023). *Valuation of Financial Reporting Quality: is it an issue in the firm's Valuation*, 387-399.
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)*, 90-102.
- Baining, M. E., Nengsih, T. A., & Ramadhani, S. (2021). *The Factors Influence Quality Of Government Financial Reports In City Of Jambi 2021*, 163-179.
- Darmawan, S. (2019). *Kontribusi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 7(3), 89-102.
- Fauzi, R., Hapsari, D., & Pradana, Y. (2020). *Keamanan dan interoperabilitas sistem akuntansi elektronik di sektor publik*. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Publik, 4(3), 205–220.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihyani, L., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2021). *Pengaruh SAP dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran Sebagai Pemoderasi*, 793-805.
- Ikyarti, T., & Aprilia, N. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma*, 131-140.
- Jauhari, M., Sari, F., & Putra, A. (2021). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah*. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 8(1), 77-89.
- Kurniawan, E., & Syafri, D. (2018). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(2), 45–58.
- Lantu, F. T., Pangkey, R. I., & Sumampouw, O. (2023). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara*, 91-97.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Mentu, E., Sondakh, J. J. (2016). *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399.
- Muntu, S. J., Helda, W. O., Nelvia, H., Hasbullah, N., & Darmawati. (2024). *Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan: Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1–15.
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, 1389-1407.
- Ramadhan, M. Z., & Nurabiah. (2024). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia*

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD BPKAD Pemerintahan Kota Bima), 1-18.

- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari Kartika, A. F. (2020). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Malang*, 43-51.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Kualitas Laporan Keuangan*, 23-34.
- Sari, F. M. (2022). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Batang)*, 27-42.
- Shohabatussa'adah, & Nasrullah, M. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan*, 14-24.
- Siallagan, H. (2022). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Sibolga*. Vol.16, No.2.
- Sihasale, D. C., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2018). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 6(1).
- Sinurat, M., Putri Sari, R. S., Sinaga, W., & Johannes, A. W. (2023). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara*, 89-105.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Statistika untuk penelitian* (Cetakan ke-27). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhayati, E., & Herdiah, M. B. (2021). *Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) dan Pengendaliann Intern Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Cianjur)*, 1-19.
- Ternalempa, P., Lolong, R., & Salama, D. (2021). *Integrasi modul TI pada siklus anggaran daerah: Perspektif real-time reporting*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(1), 75–90.
- Wiranti, N., & Wahid, M. (2021). *Implementasi sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Jurnal Akuntansi Publik, 6(2), 110–125.
- Zainuddin, Maryam, Bakri, M., Rahmi, & Ulfia. (2023). *Analisis Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Bisnis*, 356-362.

DOKUMENTASI







KUISIONER PENELITIAN

DATA IDENTITAS RESPONDEN

Isilah data dibawah ini dengan diberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu/kakak.

Nama : *(boleh tidak diisi)*

Usia :

Bidang :

Lama waktu bekerja di BKPD :

☐ 1-2 Tahun

☐ 3-4 Tahun

☐ > 4 Tahun

Latar belakang pendidikan :

☐ Diploma

☐ S1

☐ S2

☐

☐

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, dengan memilih jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda (✓). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang mendekati. Nilai atas jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tidak Memahami (TM) : Nilai 1

Hanya Sedikit Memahami (HSM) : Nilai 2

Sebagian Memahami (SM) : Nilai 3

Memahami (M) : Nilai 4

Sangat Memahami Sekali (SMS) : Nilai 5

NO	Pernyataan	Jawaban				
		TM	HSM	SM	M	SMS
1.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Neraca					
2.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					
3.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Laporan Arus Kas (LAK)					
4.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)					
5.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Persediaan					
6.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Investasi					
7.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Aset Tetap					
8.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai kontruksi dalam pengerjaan					
9.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai Kewajiban					
10.	Bapak/Ibu/Saudara memahami mengenai koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa					

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi mengacu pada penggunaan teknologi baik perangkat lunak dan keras yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pegawai dalam menjalani tugasnya.

Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, dengan memilih jawaban yang tersedia

dengan cara memberi tanda (√). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang mendekati. Nilai atas jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

Selalu (SL) : Nilai 5

Sering (SR) : Nilai 4

Kadang-Kadang (KK) : Nilai 3

Jarang (JR) : Nilai 2

Tidak Pernah (TP) : Nilai 1

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SL	SR	KK	JR	TP
A.	Jumlah Komputer yang memadai					
1.	Jumlah komputer di instansi ini memadai untuk mendukung tugas penyusunan laporan keuangan.					
2.	Rasio komputer dengan jumlah staf di bagian keuangan seimbang.					
3.	Komputer yang tersedia dapat diakses oleh seluruh staf sesuai kebutuhan.					
B.	Pemanfaatan Jaringan Internet					
1.	Jaringan internet di instansi ini stabil dan dapat diandalkan untuk proses akuntansi.					
2.	Kecepatan internet memadai untuk mengakses sistem akuntansi berbasis online.					
3.	Pemanfaatan internet digunakan secara intensif dalam proses input data keuangan.					
C.	Proses Akuntansi yang Terkomputerisasi					
1.	Seluruh proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara terkomputerisasi.					
2.	Sistem akuntansi terkomputerisasi meminimalkan kesalahan manual dalam penyusunan laporan.					
3.	Proses rekonsiliasi data keuangan telah menggunakan sistem otomatis.					
D.	Penggunaan Software Sesuai dengan Ketentuan Hukum					

1.	Software akuntansi yang digunakan telah memenuhi standar peraturan perundang-undangan.					
2.	Instansi melakukan pembaruan (update) software secara berkala sesuai ketentuan.					
3.	Software yang digunakan sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah					

3. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya sehingga laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Bapak/Ibu dimohon kesediaannya untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, dengan memilih jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda (√). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang mendekati. Nilai atas jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

Selalu (SL) : Nilai 5

Sering (SR) : Nilai 4

Kadang-Kadang (KK) : Nilai 3

Jarang (JR) : Nilai 2

Tidak Pernah (TP) : Nilai 1

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SL	SR	KK	JR	TP
A.	Relevan					
1.	Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengawasan					

2.	Laporan keuangan digunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahun yang akan datang					
3.	Laporan keuangan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen					
B.	Andal					
1.	Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengambil keputusan					
2.	Penyajian informasi pada laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya					
3.	Kepala Bidang melakukan cross check data untuk menghindari kesalahan material dan bias pada laporan keuangan					
C.	Dapat Dibandingkan					
1.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
2.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama					
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak lain, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh					
D.	Dapat Dipahami					
1.	Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLk) dapat dipahami dengan mudah					
2.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami					
3.	Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah					

*Terima kasih untuk partisipasi Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini
Kami akan menjaga kerahasiaan informasi personal yang diberikan*

TABULASI DATA KUISIONER

Tabulasi Data Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

[illegible]

Tabulasi Data Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X2)												TOTAL
PTI 1	PTI 2	PTI 3	PTI 4	PTI 5	PTI 6	PTI 7	PTI 8	PTI 9	PTI1 0	PTI1 1	PTI1 2	
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	59
5	4	5	4	4	3	5	5	4	5	4	5	53
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	57
4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	52
5	5	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	52
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	58
5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	58
3	3	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	44
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	59
4	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	49
4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5	48
3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
4	5	4	5	5	4	3	4	5	4	4	4	51
5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	52
4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	3	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51
4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	52
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	53
3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	5	5	44
4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50
4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	55
4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	53
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	48
5	4	4	4	3	3	5	4	3	5	4	4	48
4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	48
4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	50
4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	4	5	50

	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	.011	<.001	<.001		.003	<.001	<.001	.263	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PSAP 07	Pearson Correlation	.596**	.487**	.522**	.576**	.767**	.491**	1	.809**	.525**	.646**	.825**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.003	.001	<.001	<.001	.003		<.001	.001	<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PSAP 08	Pearson Correlation	.691**	.586**	.527**	.493**	.823**	.562**	.809**	1	.652**	.643**	.874**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	.001	.003	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PSAP 09	Pearson Correlation	.553**	.585**	.583**	.530**	.665**	.586**	.525**	.652**	1	.525**	.788**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	.001	<.001	<.001	.001	<.001		.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PSAP 10	Pearson Correlation	.513**	.455**	.477**	.393*	.532**	.194	.646**	.643**	.525**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	.002	.006	.004	.019	.001	.263	<.001	<.001	.001		<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.783**	.748**	.731**	.740**	.904**	.741**	.825**	.874**	.788**	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Output Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Correlations

		PTI01	PTI02	PTI03	PTI04	PTI05	PTI06	PTI07	PTI08	PTI09	PTI10	PTI11	PTI12	TOTAL
PTI01	Pearson Correlation	1	.566**	.584**	.614**	.453**	.615**	.781**	.678**	.246	.471**	.496**	.342*	.840**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	.006	<,001	<,001	<,001	.154	.004	.002	.044	<,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PTI02	Pearson Correlation	.566**	1	.626**	.775**	.392*	.555**	.231	.522**	.300	.274	.415*	.419*	.751**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	.020	<,001	.182	.001	.080	.111	.013	.012	<,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PTI03	Pearson Correlation	.584**	.626**	1	.705**	.521**	.447**	.449**	.459**	.140	.432**	.245	.467**	.742**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	.001	.007	.007	.006	.421	.009	.157	.005	<,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PTI04	Pearson Correlation	.614**	.775**	.705**	1	.564**	.602**	.312	.525**	.400*	.410*	.302	.370*	.813**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	.068	.001	.017	.014	.077	.029	<,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PTI05	Pearson Correlation	.453**	.392*	.521**	.564**	1	.712**	.348*	.368*	.246	.025	.246	.023	.627**
	Sig. (2-tailed)	.006	.020	.001	<,001		<,001	.040	.030	.154	.886	.154	.898	<,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PTI06	Pearson Correlation	.615**	.555**	.447**	.602**	.712**	1	.539**	.421*	.182	.200	.383*	.312	.751**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	.007	<,001	<,001		<,001	.012	.295	.250	.023	.068	<,001

[illegible]

TOTAL	Pearson Correlation	.840**	.751**	.742**	.813**	.627**	.751**	.648**	.761**	.463**	.545**	.629**	.531**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.005	<.001	<.001	.001	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

[illegible]

KLK07	Pearson Correlation	.589**	.706**	.546**	.331	.729**	.513**	1	.582**	.667**	.323	.527**	.853**	.822**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	.052	<.001	.002		<.001	<.001	.058	.001	<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KLK08	Pearson Correlation	.549**	.334	.628**	.501**	.540**	.595**	.582**	1	.615**	.469**	.478**	.678**	.777**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.050	<.001	.002	<.001	<.001	<.001		<.001	.004	.004	<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KLK09	Pearson Correlation	.337*	.590**	.290	.601**	.624**	.570**	.667**	.615**	1	.403*	.518**	.591**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.048	<.001	.091	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		.016	.001	<.001	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KLK10	Pearson Correlation	.316	.268	.454**	.565**	.472**	.543**	.323	.469**	.403*	1	.538**	.320	.611**
	Sig. (2-tailed)	.065	.119	.006	<.001	.004	<.001	.058	.004	.016		<.001	.061	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KLK11	Pearson Correlation	.259	.345*	.379*	.518**	.573**	.595**	.527**	.478**	.518**	.538**	1	.466**	.677**
	Sig. (2-tailed)	.133	.043	.025	.001	<.001	<.001	.001	.004	.001	<.001		.005	<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
KLK12	Pearson Correlation	.639**	.522**	.589**	.335*	.567**	.458**	.853**	.678**	.591**	.320	.466**	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.001	<.001	.049	<.001	.006	<.001	<.001	<.001	.061	.005		<.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.741**	.755**	.754**	.708**	.866**	.777**	.822**	.777**	.764**	.611**	.677**	.782**	1

Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

OUTPUT UJI RELIABILITAS

Output Uji Reliabilitas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PSAP01	32.9429	43.173	.726	.922
PSAP02	32.6000	44.247	.688	.924

PSAP03	33.1714	43.676	.661	.926
PSAP04	33.0286	43.793	.674	.925
PSAP05	33.1143	41.751	.876	.914
PSAP06	33.4286	43.605	.674	.925
PSAP07	33.0000	42.412	.777	.919
PSAP08	33.4286	39.958	.829	.916
PSAP09	33.0000	43.882	.737	.922
PSAP10	33.2286	44.770	.614	.928

Output Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PTI01	47.6286	22.064	.798	.870
PTI02	47.5143	22.845	.693	.876
PTI03	47.7714	22.476	.674	.877
PTI04	47.6286	22.593	.769	.872
PTI05	47.6857	23.339	.540	.884
PTI06	47.8571	21.655	.672	.877
PTI07	47.5143	23.787	.578	.882
PTI08	47.7714	22.064	.693	.875
PTI09	47.8857	24.222	.341	.897
PTI10	47.4000	24.659	.472	.887
PTI11	47.6286	23.476	.546	.884
PTI12	47.4000	24.482	.448	.888

Output reliabilitas kualitas laporan keuangan (Y)**Reliability****Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

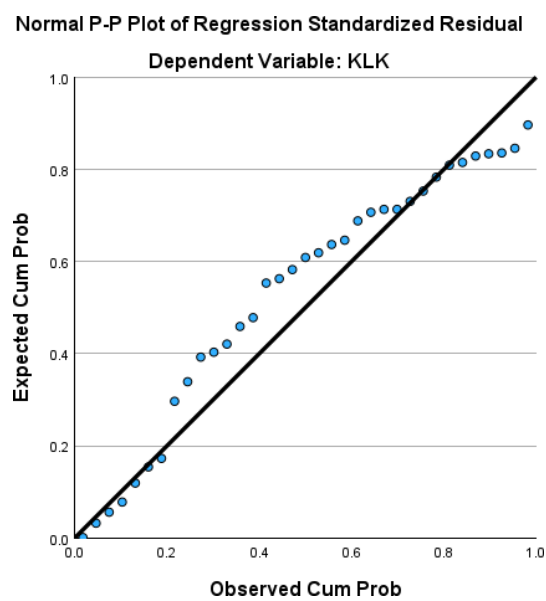
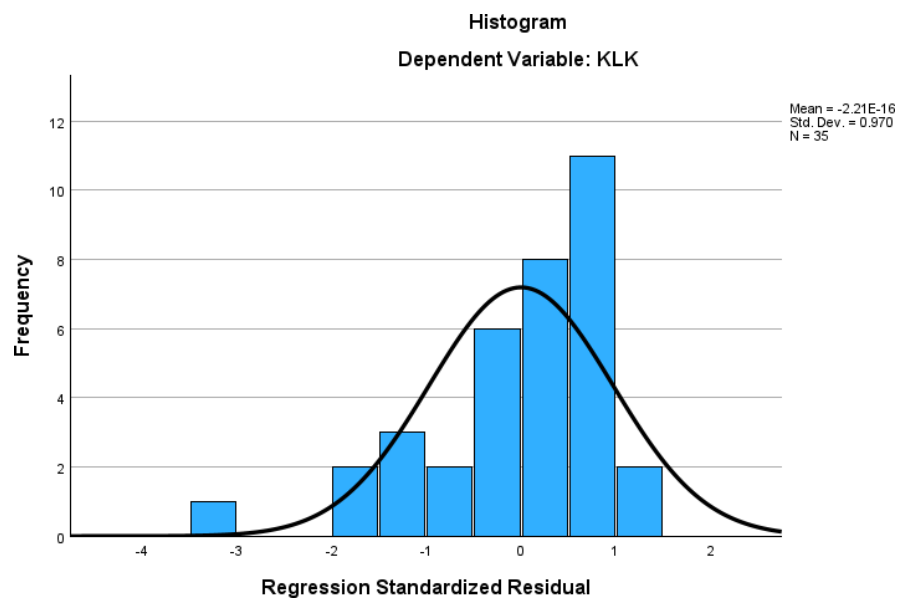
Cronbach's Alpha	N of Items
.930	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KLK01	48.2286	29.534	.688	.925
KLK02	48.1143	29.987	.711	.924
KLK03	48.2571	29.432	.703	.924
KLK04	48.4571	29.020	.638	.927
KLK05	48.4286	26.958	.825	.919
KLK06	48.4286	29.429	.732	.923
KLK07	48.4000	27.953	.775	.921
KLK08	48.5714	28.429	.721	.924
KLK09	48.4571	28.550	.705	.924
KLK10	48.3143	31.104	.553	.929
KLK11	48.4000	30.424	.622	.927
KLK12	48.4286	29.017	.734	.923

OUTPUT ASUMSI KLASIK

Output Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PSAP	PTI	KLK
N		35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	36.77	51.97	52.63
	Std. Deviation	7.268	5.221	5.776
Most Extreme Differences	Absolute	.135	.109	.103
	Positive	.101	.108	.101
	Negative	-.135	-.109	-.103
Test Statistic		.135	.109	.103
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.109	.200 ^e	.200 ^e
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.106	.355	.441
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.098	.343
		Upper Bound	.113	.368

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

e. This is a lower bound of the true significance.

Output Uji Multikolinearitas

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Coefficients^a

Collinearity Statistics

Model		Tolerance	VIF
1	X1	.962	1.040
	X2	.962	1.040

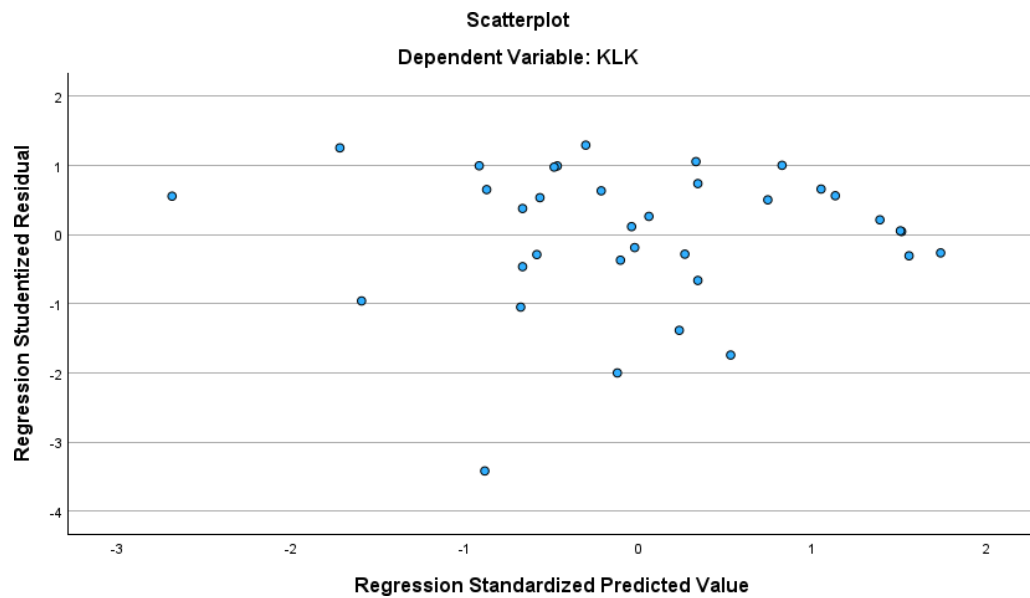
a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.971	1.000	.00	.00	.00
	2	.024	11.194	.05	.99	.07
	3	.005	24.762	.94	.01	.93

a. Dependent Variable: Y

Output Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.639	4.566		2.549	.016
	X2	-.144	.085	-.287	-1.691	.101
	X1	-.045	.059	-.129	-.758	.454

a. Dependent Variable: Abs_RES

OUTPUT UJI HIPOTESIS

Output Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.611	3.661

a. Predictors: (Constant), PTI, PSAP

Output Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	743.167	2	371.584	27.717	<,001 ^b
	Residual	429.004	32	13.406		
	Total	1172.171	34			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), PTI, PSAP

Output Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.343	6.589		.659	.515
	PSAP	.117	.088	.144	1.324	.195
	PTI	.849	.123	.755	6.925	<,001

a. Dependent Variable: KLK

DF (DEGREES OF FREEDOM)

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30684
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24964	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85196
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
 Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 202/PIP/B.04/LP-UIG/2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Dinas MP PTSP Kabupaten Bone Bolango

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
 NIDN : 0929117202
 Pangkat Akademik : Lektor Kepala
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Sartina Abd R. Ongku
 NIM : E1121001
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango)
 Lokasi Penelitian : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 12/11/2024

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
 NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN BONE BOLANGO

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No. 2 Kec. Suwawa Telp. (0435) 8591472 Kode Pos 96184

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Bersama Surat ini kami sampaikan Perihal Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Dengan Data Sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	: Sartina Abd R. Ongku
NIM	: E1121001
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Ichsan Gorontalo

Sesuai dengan data di atas, kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada 10 Januari 2025 bertempat di Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango (BKPD), dalam rangka penyusunan proposal/skripsi untuk syarat kelulusan dengan judul "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango)".

Demikian surat keterangan ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

Gorontalo,

Kasubag Umum dan Kepegawaian



Konstansion Trilun, S.STP

NIP: 19940128 201609 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
 Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 078/SRP/FE-UNISAN/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
 NIDN : 092811690103
 Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Sartina Abd. R. Ongku
 NIM : E1121001
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi
 Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi
 pada Badan Keuangan dan Pendapatan Bone
 Bolango)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
 Dekan

DR. Musafir, SE., M.Si
 NIDN. 0928116901

Gorontalo, 23 Mei 2025
 Verifikator,


Nurhasmi, S.KM

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

HASIL TURNITIN



Page 1 of 112 - Cover Page

Submission ID trn:oid::1:3256958291

Fekon06 Unisan

SARTINA ABD R. ONGKU_PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI ...

AKUNTANSI_02

Fak. Ekonomi

LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3256958291

105 Pages

Submission Date

May 22, 2025, 10:53 AM GMT+7

16,441 Words

Download Date

May 22, 2025, 11:47 AM GMT+7

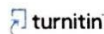
112,351 Characters

File Name

file_nina.docx

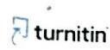
File Size

685.3 KB



Page 1 of 112 - Cover Page

Submission ID trn:oid::1:3256958291



Page 2 of 112 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::1:3256958291




28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 22%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Page 2 of 112 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::1:3256958291

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Personal Data



Nama : Sartina Abd R. Ongku
Tempat, Tanggal Lahir : Hi'on, 15 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pagimana, Sulawesi Tengah
Email : ninaongku171@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2008-2015 : SD Inpres Basabungan
2015-2018 : MTs Alkhairaat Pagimana
2018-2021 : SMA Negeri 1 Pagimana
2021-2025 : Universitas Ichsan Gorontalo